



# **LAPORAN KINERJA LPMP PROVINSI RIAU TAHUN 2020**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

**PROVINSI RIAU**

**TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI RIAU**

Jalan Gajah Nomor 21 Bambu Kuning, Pekanbaru 28281  
Telepon : (0761) 26389 – 26390, Faks : (0761) 26389

Laman : [lmppriau.kemdikbud.go.id](http://lmppriau.kemdikbud.go.id), Posel : [sekretariat.lmppriau@kemdikbud.go.id](mailto:sekretariat.lmppriau@kemdikbud.go.id)

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudi Nurman, S.Pd., M.B.A

NIP : 196403171990031008

Jabatan : Kepala LPMP Provinsi Riau

dengan ini menyatakan bahwa LPMP Provinsi Riau telah melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja LPMP Provinsi Riau Tahun 2020 untuk selanjutnya diunggah ke laman [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat menunjang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan LPMP Provinsi Riau.



Kepala,  
Yudi Nurman, S.Pd., M.B.A  
NIP. 196403171990031008

## Kata Pengantar

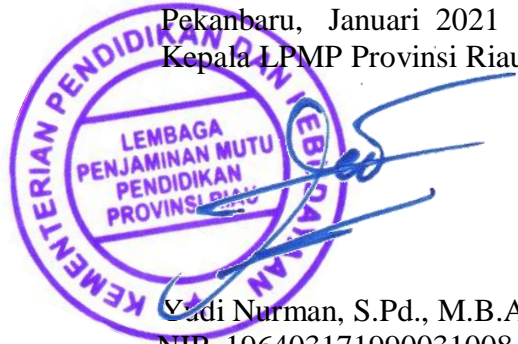
**P**uji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau telah menyelesaikan Laporan Kinerja LPMP Provinsi Riau tahun 2020. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kepala LPMP Provinsi Riau atas pelaksanaan tugas dan fungsinya menopang tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan, dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Laporan Kinerja tahun 2020 ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis LPMP Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020. LPMP Provinsi Riau sadar masih belum maksimal dalam memperoleh capaian peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Riau. Hal ini disebabkan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja LPMP Provinsi Riau pada tahun 2020. Selain itu, laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan pada tahun mendatang. Untuk penyempurnaan Laporan Kinerja LPMP Provinsi Riau tahun 2020 ini, diharapkan sumbangan saran, pemikiran, dan kritikan yang bersifat membangun sehingga dapat menjadikan Laporan Kinerja LPMP Provinsi Riau tahun 2020 lebih baik dan lebih sempurna, sesuai dengan yang diharapkan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja tahun 2020 LPMP Provinsi Riau.

Pekanbaru, Januari 2021  
Kepala LPMP Provinsi Riau,



LEMBAGA  
PENJAMINAN MUTU  
PENDIDIKAN  
PROVINSI RIAU

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Vadi Nurman, S.Pd., M.B.A.  
NIP. 196403171990031008

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Ringkasan Eksekutif .....	iv
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	A. Latar Belakang..... 1
	B. Dasar Hukum..... 4
	C. Tujuan..... 5
	D. Tugas dan Fungsi..... 5
	E. Struktur Organisasi..... 6
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... 8
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA..... 12
	A. Capaian Kinerja..... 12
	B. Realisasi Anggaran..... 38
BAB IV	PENUTUP..... 44
	A. Simpulan ..... 44
	B. Saran..... 44
Lampiran	

Perjanjian Kinerja  
Form B19

## Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja LPMP Provinsi Riau menjabarkan berbagai kegiatan tahun 2020 sesuai dengan tugas dan fungsi yang meliputi kegiatan-kegiatan dan program penjaminan mutu pendidikan di tingkat propinsi. LPMP Provinsi Riau melaporkan capaian kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) program yang mendukung hasil tersebut. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada program/kebijakan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran lembaga. Laporan ini menyatakan capaian kinerja lembaga sesuai dengan kebijakan dalam sasaran dan tujuan strategis dari rencana strategis LPMP Provinsi Riau.

Keuangan yang dialokasikan pemerintah dari APBN LPMP Provinsi Riau pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 23.236.885.000,- (dua puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan daya serap sebesar Rp. 22.394.885.968,- (dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) atau 96,38% dari total anggaran. Setiap tahun anggaran, instansi berwenang selalu melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga pemerintah. LPMP Provinsi Riau berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk Laporan Kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang kinerja instansi pemerintah dan kebermanfaatannya, antara lain:

- a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah (*good governance*) yang didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat

beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

- b. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
- c. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah/LPMP.
- d. Laporan Kinerja juga digunakan sebagai bahan masukan bagi Kemdikbud dan Dikdasmen dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Selanjutnya, selama kurun setahun program dan kegiatan, LPMP Provinsi Riau menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan tersebut mempengaruhi capaian target yang telah ditetapkan.

Kepala

Pekanbaru, Januari 2021



Yudi Nurman, S.Pd., M.B.A.  
NIP. 196403171990031008



## A. Latar Belakang

Berbagai perubahan paradigma dan pandangan bidang pendidikan terus bergeser seiring dengan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan. Implikasinya dirasakan dalam berbagai aspek pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Selain itu juga memacu timbulnya berbagai tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan dan pemberian pelayanan prima oleh aparatur pemerintah yang menangani pendidikan. Untuk mengakomodir tuntutan tersebut, pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan, program dan kegiatan strategis untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin berkembang.

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara tersebut sekaligus menjadi tujuan pendidikan yang dikembangkan di Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 31 memperjelas bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, SARA, dan gender. Sistem pendidikan yang dianut di Indonesia mengandung asas demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dengan tetap mengedepankan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menyebabkan terjadinya pergeseran peta dan paradigma pendidikan, yaitu yang semula dikelola secara sentralistik oleh pemerintah pusat sekarang dikelola oleh pemerintah daerah. Kondisi ini sangat diharapkan mampu menciptakan pengelolaan pendidikan menjadi lebih kompetitif sehingga menghasilkan lulusan atau tamatan yang berkualitas dan terstandar guna menuju otonomi dan privatisasi dalam bidang pendidikan.

Untuk mendukung pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan pengendalian terhadap mutu (*quality control*) dan penjaminan mutu (*quality assurance*). Dengan tujuan agar pelaksanaan pendidikan sesuai dengan standar,



norma, kriteria dan pedoman penyelenggaraan pendidikan nasional dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien dan akuntabel demi terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemdikbud yang berada di tingkat provinsi. Diharapkan mampu menjadi agen informasi dalam meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan yang lebih profesional dengan mewujudkan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta pementapan operasionalisasi kebijakan pemerintah pusat khususnya dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Dengan meningkatnya kualitas guru dan tenaga kependidikan, maka semakin mempercepat peningkatan mutu satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di Provinsi. Karena mengingat guru dan tenaga kependidikan yang berada di satuan pendidikan yang berperan sebagai agen perubahan terhadap peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, LPMP Provinsi Riau sangat perlu membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah provinsi dan kab/kota agar mendapatkan dukungan berupa kebijakan daerah maupun penyalarsan program yang mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi LPMP Provinsi Riau khususnya dalam hal pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Riau.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPMP Provinsi Riau menyusun program kerja yang berpedoman kepada :

1. “Nawacita” yang berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan memberikan perhatian untuk :
  - a. meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
  - b. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional;
  - c. melakukan revolusi karakter bangsa;
  - d. memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
2. Program prioritas 5 (lima) tahun ke depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu memperbaiki:
  - a. akses terhadap pendidikan berkualitas;
  - b. kualitas pembelajaran;
  - c. sistem penjaminan mutu;
  - d. manajemen dan tata kelola pendidikan;
  - e. relevansi dan daya saing pendidikan tinggi;
  - f. pendidikan agama, moral, dan pembentukan karakter.

3. Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu :
  - a. Perluasan akses pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
  - b. Penguatan mutu Pembelajaran Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah yang berpusat pada perkembangan peserta didik
  - c. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
  - d. Penguatan sistem tata kelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
4. Turunan arah kebijakan dan strategi Ditjen Dikdasmen Kemdikbud yang sesuai dengan tupoksi LPMP sesuai Permendikbud No. 26 tahun 2020 dan DIPA LPMP Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 menjadi pedoman pembuatan program kerja LPMP Provinsi Riau kedepan yaitu Isu Strategis Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Peningkatan Tata Kelola Pendidikan. Dalam pencapaian isu strategis tersebut, LPMP Provinsi Riau menetapkan arah kebijakan yaitu:
  - a. Memetakan mutu pendidikan di setiap jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Riau;
  - b. Mensupervisi dan memfasilitasi pencapaian SNP satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Riau;
  - c. Meningkatkan tata kelola lembaga yang efektif, transparan, akuntabel dan melibatkan publik dalam peningkatan mutu layanan di Provinsi Riau.

Dalam meningkatkan penjaminan mutu Pendidikan bagi semua Satuan Pendidikan di Provinsi Riau upaya-upaya yang dilakukan oleh LPMP Provinsi Riau adalah:

1. Melaksanakan fasilitasi dan kerja sama yang efektif dalam peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian SNP di Provinsi Riau dalam bentuk bimbingan dan pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi sekolah binaan dan sekolah imbas.
2. Pembentukan organisasi/tim/divisi independen untuk melaksanakan layanan fasilitasi dan kerjasama peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian SNP dengan *stakeholder* di bidang pendidikan.
3. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi pendidikan sebagai pusat informasi mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Riau.

4. Merancang dan melaksanakan sistem pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Riau dalam pencapaian SNP
5. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan dengan terus membangun kapasitas Lembaga, agar LPMP Provinsi Riau mampu melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
12. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Perjanjian Kinerja;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
14. Permenpan nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP;
17. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
19. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Rencana Strategis LPMP Provinsi Riau Tahun 2015 – 2019;
21. Kontrak Kinerja Kepala LPMP Provinsi Riau dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2019.

### **C. Tujuan**

Laporan Kinerja LPMP Provinsi Riau disusun dengan tujuan untuk memberikan penjelasan tentang :

1. perbaikan berkesinambungan bagi LPMP Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerjanya;
2. Keberhasilan, ketercapaian dan kurang berhasilnya pencapaian kinerja dari sasaran strategis LPMP Provinsi Riau dari bulan Januari s.d. Desember 2020;
3. kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
4. sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Provinsi Riau sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PAUD dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **D. Tugas dan Fungsi**

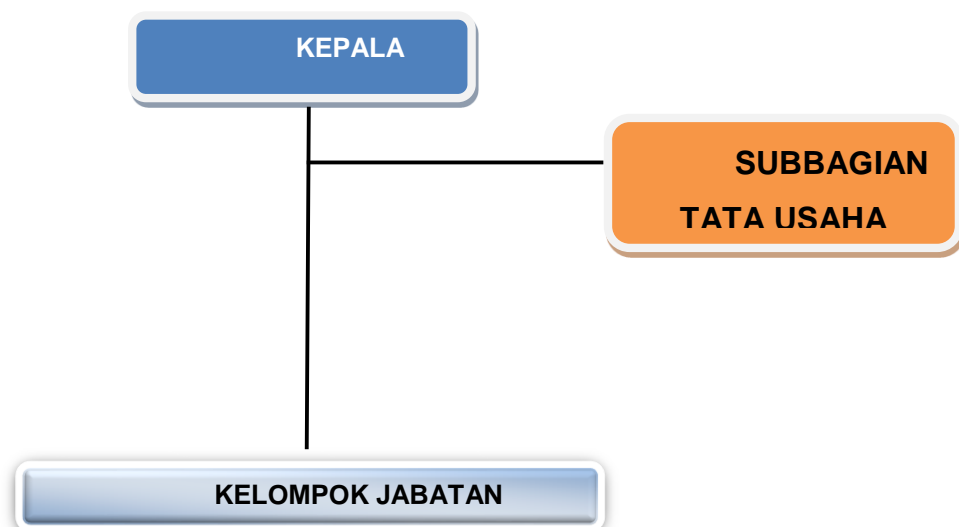
Berdasarkan Permendikbud No. 26 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja LPMP, menyatakan bahwa LPMP bertugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan

kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi:

1. pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
3. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional;
4. pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;
5. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
6. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
7. pelaksanaan urusan administrasi.

#### E. Struktur Organisasi

**Bagan 1.1. Struktur Organisasi LPMP Provinsi Riau  
(Permendikbud No. 26 Tahun 2020)**



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala LPMP Provinsi Riau dibantu oleh

Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional :

Subbagian Tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Untuk operasionalisasi secara substansi, maka kepala LPMP Provinsi Riau menunjuk koordinator substansi terdiri dari

1. Koordinator Subtansi Pemetaan Mutu dan Supervisi mempunyai tugas melakukan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional
2. Koordinator Subtansi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
3. Koordinator Subtansi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan. Sedangkan kelompok jabatan fungsional berada di bawah pembinaan Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan.
4. Koordinator Subtansi Fungsional Tertentu

**VISI**

LPMP Provinsi Riau mendukung Visi dan Misi Kemdikbud untuk mewujudkan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global

**MISI**

1. Mewujudkan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

**Sasaran Strategis**

1. Terpetakannya mutu pendidikan berdasarkan SNP satuan pendidikan di Provinsi Riau;
2. Terlaksananya supervisi dan fasilitasi pada satuan pendidikan dalam pencapaian SNP;
3. Terbentuknya pangkalan data pendidikan untuk setiap jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Riau;
4. Terwujudnya tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel.

**SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM  
PADA RENSTRA LPMP PROVINSI RIAU 2020-2014**

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan
<b>Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun</b>		
	Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang dasar dan menengah	Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki indeks capaian Siswa minimal 75
		Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk
		Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan
<b>Program Dukungan Manajemen</b>		
	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas	Predikat SAKIP LPMP Provinsi Riau
		Jumlah Satker lain yang mendapat predikat ZI WBK
		Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL



**Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja  
LPMP Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024**

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS 1	Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah						
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	105,97	104,48	102,98	01,49	00,00
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	92,46	94,34	96,23	98,11	00,00
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	86,18	88,39	90,59	92,80	95,00

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS 2	Meningkatkan tata kelola lembaga yang efektif, transparan, akuntabel dan pelibatan publik dalam peningkatan mutu layanan di Provinsi Riau						
IKSS 2.1	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS 2.2	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	Indeks	81	82	82	83	84



# PERJANJIAN KINERJA 2019

KEPALA LPMP PROVINSI RIAU DENGAN DIRJEN

## Sasaran Strategis

“Peningkatan Layanan Pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan”

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh Jenjang Pendidikan	Persentase satuan Pendidikan (Jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) minimal 75	%	26,50
		Persentase kesenjangan hasil AKM dan survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5.00
		Persentase Kab/Kota. Yang memiliki data pokok Pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95.00

### TOTAL ANGGARAN

LPMP PROVINSI RIAU TAHUN 2020 : Rp 23.236.885.000,-



Sesuai dengan Perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020, LPMP Provinsi Riau berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya dan juga sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian-capaian kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan hasil capaian kinerja LPMP Provinsi Riau.

#### A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja program dan kegiatan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Riau merupakan salah satu layanan penting dari Ditjen PAUD dikdas dan Dikmen terhadap penjaminan mutu pada satuan pendidikan di seluruh Provinsi. Sesuai dengan Perjanjian kinerja pada tahun 2020, LPMP Riau memiliki 1 (satu) Sasaran Kegiatan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk dicapai. Berikut tingkat ketercapaian Sasaran Kegiatan LPMP Provinsi Riau selama Tahun 2020.

**Tabel 1.1 Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan**

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Target Renstra 2024	Capaian Renstra 2024
	Target	Realisasi	%		
1.1 Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) minimal 75	26,50%	33,7%	127,17%	30,1%	111,96%

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Target	Capaian
	Target	Realisasi	%	Renstra 2024	Renstra 2024
1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5,00 %	4,0%	80,00%	5%	80,00%
1.3 Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	95,00 %	95,94%	100,99%	95,8%	100,15%

Output capaian kinerja ini dapat dilihat dari uraian berikut:

**1. IKK1. Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) minimal 75**

Untuk mendukung tercapainya IKK 1 LPMP provinsi Riau melaksanakan kegiatan dari pemetaan mutu pendidikan, supervise dan fasilitasi terhadap satuan Pendidikan.

1.1 Sekolah yang terpetakan mutu

Berdasarkan perhitungan rapor PMP tahun 2020 lalu, maka dapat dilihat sebaran nilai kinerja sekolah dari jenjang SD hingga SMA menurut kriteria nilai kinerja (*score card*) minimal 75 pada tabel dibawah ini :

**Tabel rekap jumlah satuan pendidikan berdasarkan nilai per jenjang.**

No	Jenjang	Diatas 6,59		Dibawah 6,59		Jumlah Sekolah
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	SD	1.063	32,5%	2.209	67,5%	3.272
2	SMA	163	43,6%	211	56,4%	374
3	SMP	443	41,7%	620	58,3%	1.063
<b>Total</b>		<b>1.669</b>	<b>35,4%</b>	<b>3.040</b>	<b>64,6%</b>	<b>4.709</b>

Dari tabel diatas terlihat sebaran nilai kinerja sekolah (*score card*) masih dominan berada dibawah 6,59 yaitu sebanyak 64%. Namun hal ini sebenarnya merupakan sebuah capaian yang baik karena target LPMP Riau untuk mendorong satuan pendidikan yang ditahun 2018 masih banyak berada di SNP 3 saat ini sudah meningkat capaian rapor PMP-nya sehingga meningkat kategorinya menjadi menuju SNP 4. Disamping itu, meskipun jumlah satuan pendidikan dengan capaian rapornya berada diatas 6,59 baru 35,4%, namun pada kelompok ini juga terjadi peningkatan jumlah satuan pendidikan yang nilai capaian rapor PMP-nya masuk dalam kategori SNP.

Sebaran nilai kinerja sekolah dari jenjang SD hingga SMA perkabupaten/kota se- Provinsi Riau menurut kriteria nilai kinerja (*score card*) minimal 75 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel rekap jumlah satuan pendidikan berdasarkan nilai per kabupaten/kota**

No	Kabupaten	Diatas 6,59		Dibawah 6,59		Jumlah Sekolah
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kab. Bengkalis	191	42,8%	255	57,2%	446
2	Kab. Indragiri Hilir	137	23,9%	437	76,1%	574
3	Kab. Indragiri Hulu	86	33,2%	173	66,8%	259
4	Kab. Kampar	219	34,1%	424	65,9%	643
5	Kab. Kepulauan Meranti	102	45,1%	124	54,9%	226

6	Kab. Kuantan Singingi	139	41,6%	195	58,4%	334
7	Kab. Pelalawan	92	34,3%	176	65,7%	268
8	Kab. Rokan Hilir	160	31,6%	346	68,4%	506
9	Kab. Rokan Hulu	158	31,0%	351	69,0%	509
10	Kab. Siak	175	48,3%	187	51,7%	362
11	Kota Dumai	59	37,3%	99	62,7%	158
12	Kota Pekanbaru	151	35,6%	273	64,4%	424
<b>Total</b>		<b>1.669</b>	<b>35,4%</b>	<b>3.040</b>	<b>64,6%</b>	<b>4.709</b>

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa Kabupaten Siak memiliki persentase jumlah satuan pendidikan terbanyak yang mencapai nilai kinerja (*score card*) diatas 75 yaitu 175 sekolah atau 48,3%. Sementara itu kabupaten Indragiri Hilir menjadi kabupaten/kota dengan persentase jumlah satuan pendidikan terkecil yang mencapai nilai kinerja (*score card*) diatas 75 yaitu sebanyak 137 sekolah atau 23,9%.

Jika dilihat sebaran satuan pendidikan menurut jenjang dan kabupaten/kota dengan capaian nilai kinerja (*score card*) diatas 75 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel rekap jumlah nilai diatas 6,59 berdasarkan jenjang dan kabupaten/kota**

No	Kabupaten	SD		SMP		SMA		Jumlah Sekolah
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kab. Bengkalis	122	39,5%	48	50,5%	21	50,0%	191
2	Kab. Indragiri Hilir	94	22,2%	34	27,6%	9	33,3%	137
3	Kab. Indragiri Hulu	54	28,0%	21	52,5%	11	42,3%	86
4	Kab. Kampar	148	31,2%	51	41,5%	20	44,4%	219

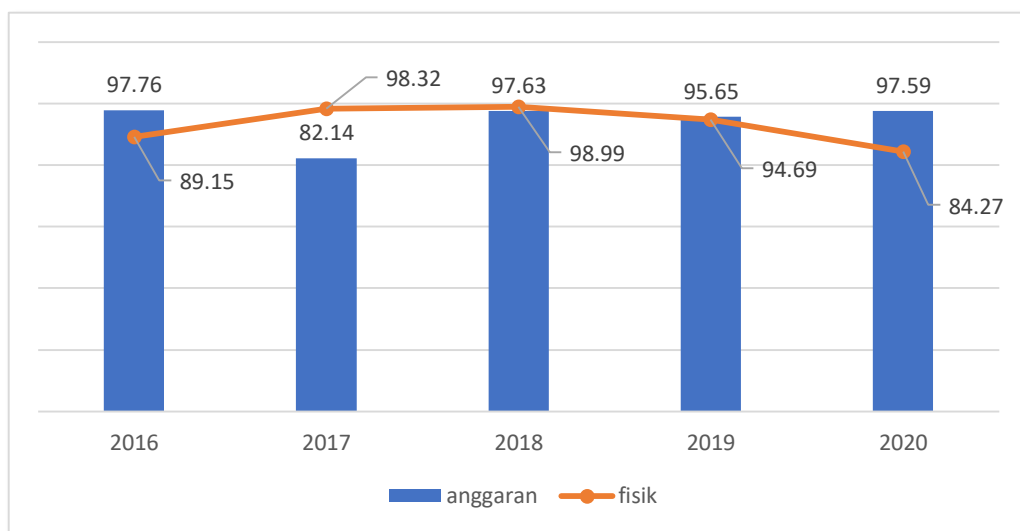
5	Kab. Kepulauan Meranti	77	47,8%	19	42,2%	6	30,0%	102
6	Kab. Kuantan Singingi	85	35,0%	44	61,1%	10	52,6%	139
7	Kab. Pelalawan	64	34,4%	23	35,4%	5	29,4%	92
8	Kab. Rokan Hilir	109	32,2%	40	34,5%	11	21,6%	160
9	Kab. Rokan Hulu	99	28,1%	44	35,2%	15	46,9%	158
10	Kab. Siak	105	45,5%	52	51,0%	18	62,1%	175
11	Kota Dumai	25	23,6%	23	62,2%	11	73,3%	59
12	Kota Pekanbaru	81	32,0%	44	36,7%	26	51,0%	151
<b>Total</b>		<b>1.063</b>		<b>443</b>		<b>163</b>		<b>1.669</b>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk jenjang SD dengan persentase jumlah satuan pendidikan yang mencapai nilai kinerja (*score card*) diatas 75 adalah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan jumlah sekolah 77 atau 47,8%. Jenjang SMP dengan persentase jumlah satuan pendidikan yang mencapai nilai kinerja (*score card*) diatas 75 adalah Kota Dumai dengan jumlah sekolah 23 atau 62,2%. Adapun jenjang SMA dengan persentase jumlah satuan pendidikan yang mencapai nilai kinerja (*score card*) diatas 75 juga diraih oleh Kota Dumai dengan jumlah sekolah 11 atau 73,3%.

Sebaliknya persentase jumlah satuan pendidikan jenjang SD yang mencapai nilai kinerja (*score card*) diatas 75 paling kecil adalah Kota Dumai dengan jumlah sekolah 25 atau 42,4%. Persentase jumlah satuan pendidikan jenjang SMP yang mencapai nilai kinerja (*score card*) diatas 75 paling kecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan jumlah sekolah 19 atau 18,6%. Dan persentase jumlah satuan pendidikan jenjang SMA yang mencapai nilai kinerja (*score card*) diatas 75 paling kecil adalah Kabupaten Pelalawan dengan jumlah sekolah 5 atau 5,4%.

Nilai kinerja (*score card*) satuan pendidikan ini diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data mutu pendidikan yang dilakukan dari tahun ketahun. Melalui kegiatan

pengumpulan data mutu pendidikan ini akan terbit rapor mutu satuan pendidikan dan rapor mutu wilayah sehingga akan terpetakan mutu setiap satuan pendidikan dalam wilayah baik provinsi, kabupaten/kota hingga ketingkat kecamatan. Jika diperhatikan realisasi anggaran dibandingkan dengan jumlah sekolah yang telah memiliki nilai kinerja (*score card*) yang didasarkan atas rapor PMP dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



**Grafik 1. Persentase Realisasi Capaian Fisik dan Anggaran Tahun 2016 s.d. 2020**

Berdasarkan grafik persentase realisasi capaian fisik anggaran diatas, efisiensi penggunaan anggaran Program Satuan Pendidikan Yang Terpetakan Mutu Pendidikannya (5630.001) terjadi pada tahun 2017 dan 2018 dengan Analisa persentase capaian fisik lebih besar dari capaian anggaran. Sedangkan tahun 2019 dan 2020, persentase capaian Anggaran lebih besar dari capaian fisik. Jika dilihat selisih capaian fisik dan anggaran di tahun 2020 terpaut jauh. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal :

1. Pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia termasuk Indonesia sehingga kegiatan-kegiatan terkait pelaksanaan pengumpulan data mutu pendidikan tahun 2020 banyak yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, baik karena rasionalisasi anggaran maupun karena pembatasan pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak.
2. Pemerintah melalui Perpress Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kemendikbud menggantikan Perpress Nomor 72 Tahun 2019 membentuk direktorat jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dimana didalamnya dirumuskan kebijakan pendidikan vokasi kejuruan dan pendidikan keterampilan serta pelatihan kerja.



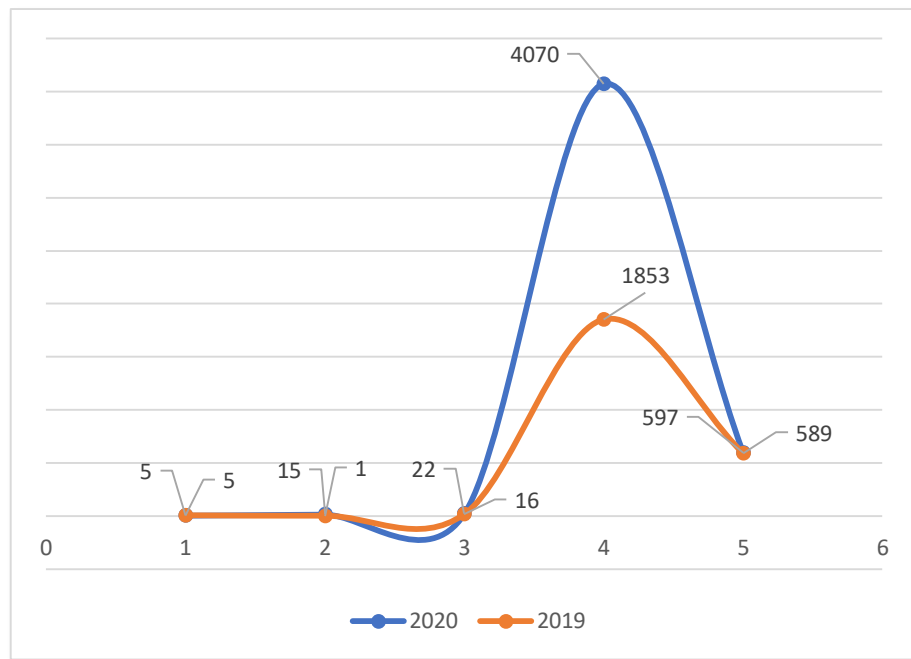
Sehingga dengan terbitnya perpress tersebut, SMK secara resmi tidak lagi berada dibawah Dirjen PAUD Dasmen, melainkan berada dibawah Dirjen Vokasi. Pengumpulan data mutu dan pemetaan mutu pendidikan jenjang SMK akan langsung ditangani oleh Dirjen Vokasi.

3. Aplikasi PMP tahun 2019 dilaksanakan secara *online* namun pada tahun 2020 berubah menjadi *offline*. Perubahan ini sangat mempengaruhi kinerja pengiriman data PMP ke server pusat khususnya kinerja operator sekolah. Hal ini juga mengakibatkan keterlambatan pengiriman data PMP sehingga terjadi beberapa kali perubahan jadwal cutt-off. Dari yang semula cutt-of tanggal 31 Oktober 2020 bergeser menjadi tanggal 31 November. Keterlambatan ini sekaligus mempengaruhi proses pengolahan rapor mutu sekolah maupun rapor mutu Wilayah.
4. Masih ada kendala teknis aplikasi dimana banyak sekolah yang tercatat sudah mengirimkan data PMP ke server pusat, tetapi rapor mutunya tidak terbit atau rapor mutunya terbit dengan nilai 0 (nol) pada beberapa standar. Ada juga sekolah yang gagal melakukan registrasi PMP sehingga tidak bisa melakukan pengentrian data PMP. Dan beberapa sekolah respondennya tidak muncul sebagaimana mestinya.

Kendala-kendala diatas berdampak kepada ketersediaan Rapor Mutu Satuan pendidikan dan Rapor Mutu Wilayah Provinsi Riau Tahun 2020. Kondisi ini akan mempengaruhi kesiapan pelaksanaan penyusunan Peta Mutu Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2021 serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pemanfaatan data PMP. Untuk itu LPMP Riau merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dilakukan penyempurnaan aplikasi PMP agar tidak terjadi kendala teknis seperti pada tahun 2020.
2. Pengumpulan data mutu pendidikan langsung dilaksanakan melalui aplikasi Dapodik sehingga tidak menambah beban kerja operator sekolah yang juga berakibat terhadap kualitas data mutu pendidikan.

Pergerakan jumlah satuan pendidikan yang meningkat nilai kinerja sekolah (*score card*)-nya dari tahun 2019-2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



**Grafik Persentase Peningkatan nilai kinerja Satuan Pendidikan**

Berdasarkan grafik diatas, terjadi peningkatan nilai kinerja sekolah berdasarkan hasil PMP tahun 2019. Peningkatan terjadi disetiap kategori capaian. Capaian SNP satuan pendidikan di Provinsi Riau tertinggi berada pada kategori Menuju SNP 4 (2217 sekolah atau meningkat 47,1%), selanjutnya kategori menuju SNP 2 (14 sekolah atau meningkat 0,3%), diikuti kategori sudah SNP (8 sekolah atau meningkat 0,2%) dan terakhir menuju SNP 3 (6 sekolah atau meningkat 0,1%). Kondisi ini menggambarkan adanya peningkatan mutu satuan pendidikan dari tahun sebelumnya.

## 1.2. Sekolah yang terverifikasi data mutunya



Untuk menunjang kegiatan **Sekolah Yang Terverifikasi Data Mutunya**, LPMP Riau melaksanakan rangkaian kegiatan yaitu:

- i. Bimbingan Teknis (Bimtek) Operator Dapodik dan Pengawas Sekolah  
Bimtek Pengawas Sekolah di tahun 2019 diberikan pada 819 peserta dengan tingkat kehadiran 100%, sedangkan di tahun 2020 sasaran Bimtek Operator Dapodik dan Pengawas Sekolah sebanyak 817
- ii. Verifikasi dan Validasi Rapor Mutu Satuan Pendidikan  
Pada tahun 2019, sasaran sekolah yang di verval sebanyak 1115 sekolah dengan bentuk kegiatan memberdayakan pengawas sekolah dengan mengunjungi sekolah binaan untuk diverifikasi dan divalidasi hasil isian instrument PMP. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan verval tahun 2019, LPMP merubah pola kegiatan dengan menyusun instrumen dan langsung mengunjungi sekolah responden untuk melakukan verval terhadap kesesuaian hasil rapor PMP dengan kondisi nyata di lapangan. Adapun sasaran sekolah yang di kunjungi sebanyak 4 sekolah di setiap kab/kota denag jumlah sekolah yang di verval sebanyak 48 sekolah
- iii. Pengumpulan Data PMP  
Sasaran Pengumpulan data PMP tahun 2019 sebanyak 5532 sekolah dan terealisasi sebanyak 5238 Sekolah (94,68%). Di tahun 2020 kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan mengunjungi sekolah responden untuk melihat permasalahan yang di hadapi sekolah dalam

mengisi dan mengirimkan instrumen PMP dengan jumlah sekolah responden sebanyak 48 sekolah yang tersebar di 12 kab/kota yang ada di Provinsi Riau.



Untuk menunjang kinerja Sekolah Terpetakan Mutu Pendidikan, LPMP melakukan kegiatan antara lain:

a. Analisis Data Mutu

Kegiatan ini pada tahun sebelumnya dilakukan **Reviu Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu** terlebih dahulu, yang dihadiri oleh 90 orang peserta dengan tingkat kehadiran peserta 100%. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Penyusunan Analisis Data dan Rekomendasi Peningkatan Mutu Pendidikan yang diikuti oleh Pengawas Sekolah dan Pegawai LMP Provinsi Riau sebanyak 60 orang dengan tingkat kehadiran 100%.

Pada tahun 2020 untuk memenuhi kinerja Sekolah Terpetakan Mutu

Pendidikannya dilakukan Analisis Data Mutu berbentuk Rapat Dalam Kantor (RDK) yang melibatkan pengawas dan pegawai LPMP Provinsi Riau. RDK dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap dimana masing-masing angkatan terdiri 36 orang peserta dari unsur pengawas dan pegawai LPMP Provinsi Riau dengan tingkat kehadiran peserta 100%. (KEGIATAN PMS)

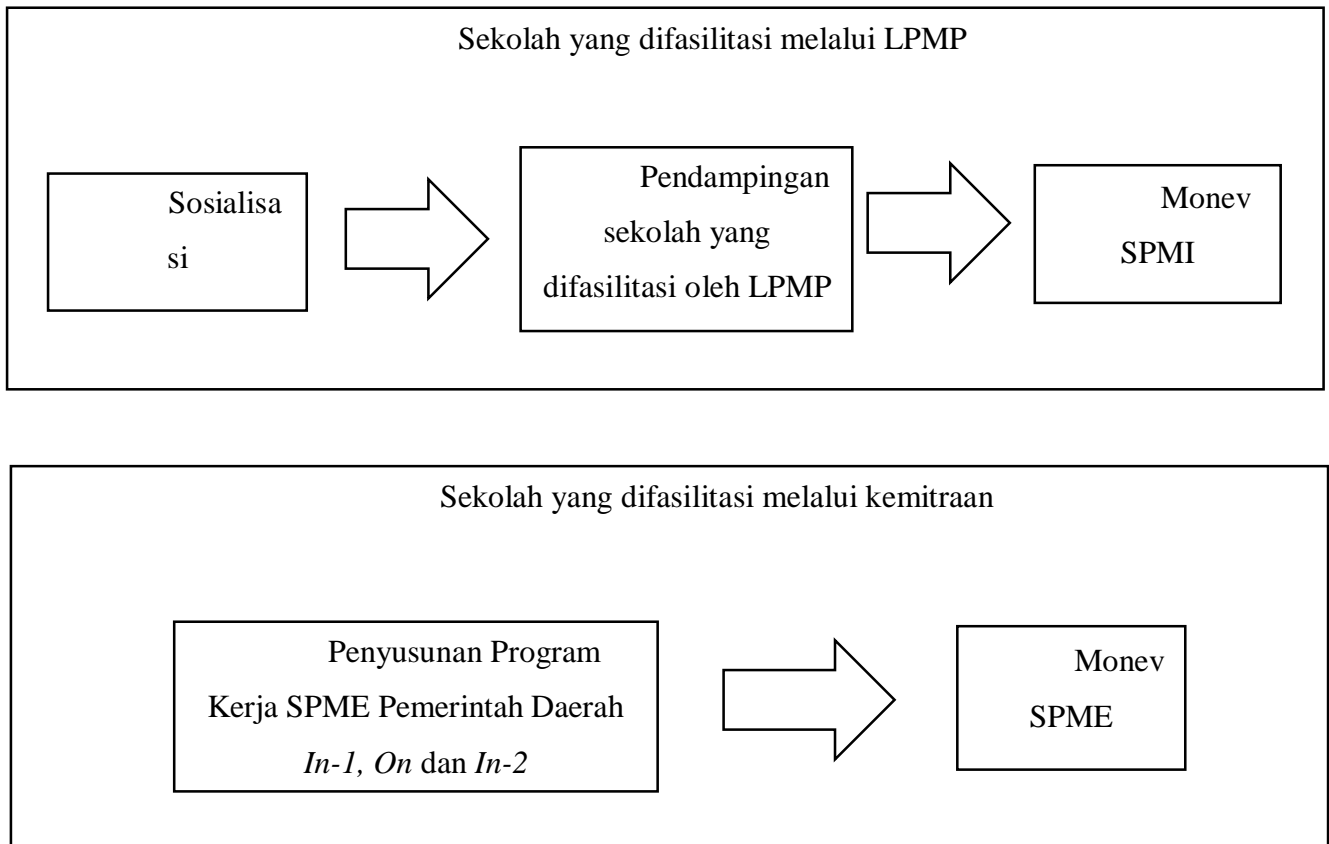
b. Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu

Sebagai lanjutan dari kegiatan Analisis Data Mutu, LPMP Provinsi Riau melaksanakan kegiatan Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu melibatkan pejabat Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Pengawas Sekolah dengan tingkat kehadiran 100%. (KEGIATAN PMS)

c. Diseminasi Pemetaan Mutu

Kegiatan diseminasi bertujuan untuk mensosialisasikan hasil data mutu pendidikan tahun 2019 kepada stake holder di Provinsi Riau dengan mengundang pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Kab/Kota se-Provinsi Riau, Kepala Bapedda, Kepala Sekolah, Koordinator Pengawas dan Pegawai LPMP Provinsi Riau berjumlah 81 orang dengan tingkat kehadiran peserta 100%.

### 1.3. Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP



Menurut diagram di atas, Satuan pendidikan yang difasilitasi melalui LPMP berdasarkan 8 SNP yang dilakukan oleh LPMP Provinsi Riau di tahun 2020, diawali dengan kegiatan sosialisasi SPMI kepada pemangku kepentingan daerah di 12 Kabupaten/Kota dan Provinsi dan Sosialisasi SPMPDM kepada sekolah binaan di 12 Kabupaten/Kota yang berjumlah 240 sekolah. Selanjutnya dilakukan kegiatan pendampingan sekolah yang difasilitasi oleh LPMP melalui daring untuk 240 sekolah binaan dan 960 sekolah imbas yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Total sekolah yang difasilitasi ini sebanyak 1.200 sekolah. Kegiatan pendampingan ini dilakukan untuk 5 tahap pendampingan secara daring. Selanjutnya setelah kegiatan pendampingan, dilakukan monitoring dan evaluasi SPMI ke semua sekolah binaan dan 1 sekolah imbasnya. Rincian sekolah yang difasilitasi melalui LPMP tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel ...**  
**Sekolah Binaan LPMP Provinsi Riau Tahun 2020**

No	Kab/Kota	Jenjang				Jumlah
		SD	SMP	SMA	SMK	
1	Bengkalis	7	10	2	2	21
2	Indragiri Hilir	4	9	3	0	16
3	Indragiri Hulu	13	11	1	0	25
4	Kampar	11	14	6	3	34
5	Kepulauan Meranti	9	5	1	0	15
6	Kuantan Singingi	4	9	0	0	13
7	Pelalawan	8	4	2	1	15
8	Rokan Hilir	6	8	5	2	21
9	Rokan Hulu	9	8	1	4	22
10	Siak	5	11	3	1	20
11	Dumai	3	6	0	1	10
12	Pekanbaru	17	5	3	3	28
	<b>Jumlah</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>240</b>

**Tabel ...**  
**Sekolah Imbas LPMP Provinsi Riau Tahun 2020**

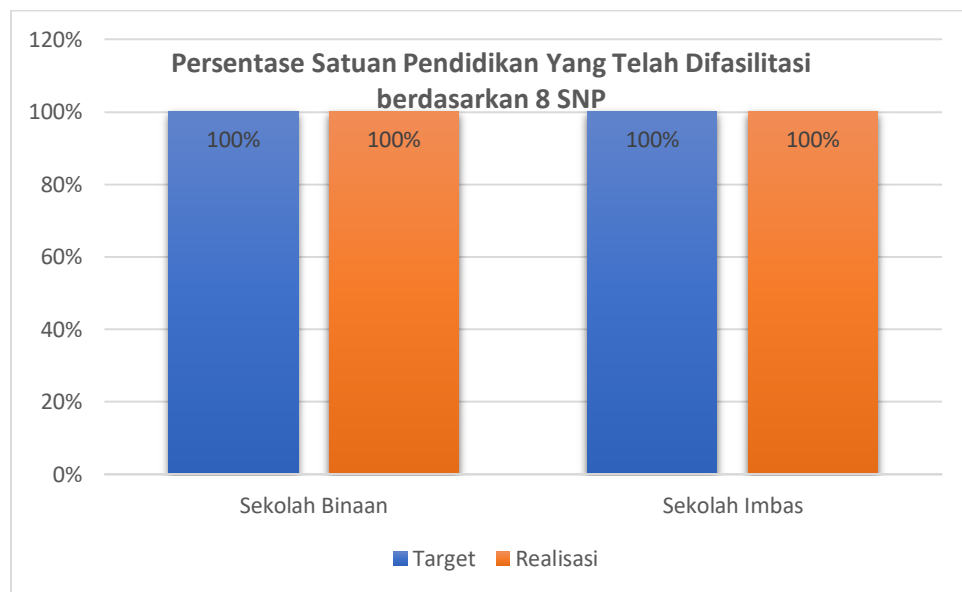
No	Kab/Kota	Jenjang				Jumlah
		SD	SMP	SMA	SMK	
1	Bengkalis	31	43	7	7	88
2	Indragiri Hilir	13	37	10	0	60
3	Indragiri Hulu	52	37	4	0	93
4	Kampar	45	36	20	12	113
5	Kepulauan Meranti	35	18	4	0	57
6	Kuantan Singingi	20	40	0	0	60
7	Pelalawan	36	15	8	4	63
8	Rokan Hilir	26	35	17	7	85

9	Rokan Hulu	44	27	3	14	88
10	Siak	25	52	8	4	89
11	Dumai	14	20	0	5	39
12	Pekanbaru	75	25	13	12	125
	Jumlah	<b>416</b>	<b>385</b>	<b>94</b>	<b>65</b>	<b>960</b>

Terlihat pada tabel sekolah binaan dan sekolah imbas yang di fasilitasi oleh LPMP, ada satuan pendidikan jenjang SMK. Satuan pendidikan jenjang SMK masuk ke dalam sekolah yang difasilitasi LPMP karena pada saat terjadi pemisahan SMK dari Paud Dikdasmen, satuan pendidikan SMK tersebut sudah ditetapkan menjadi sekolah target yang akan dibiayai DIPA LPMP Provinsi Riau di tahun 2020.

**Grafik 3.3**

**Persentase Satuan Pendidikan Yang Telah Difasilitasi berdasarkan 8 SNP**



Untuk sekolah yang difasilitasi melalui kemitraan, dilakukan kegiatan Penyusunan Program Kerja SPME Pemerintah Daerah dengan sasaran Pemerintah Daerah di 12 Kabupaten/Kota dan Provinsi. Kegiatan ini dalam bentuk In Service 1, On service (secara daring) dan In Service 2 secara tatap muka.

**Analisis pelaksanaan fasilitasi tahun 2020 berdasarkan grafik 3.3**

Analisis pelaksanaan fasilitasi tahun 2020 berdasarkan grafik 3.4, Persentase capaian satuan pendidikan yang telah difasilitasi dalam pencapaian 8 SNP Tahun 2020 adalah



sebanyak 100%, dimana target untuk tahun 2020 adalah pelaksanaan fasilitasi terhadap 240 sekolah binaan LPMP beserta 960 sekolah imbas. Ketercapaian target ini juga dipengaruhi oleh koordinasi dengan Dinas Pendidikan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota beserta satuan pendidikan yang lebih baik.

Kendala/hambatan pelaksanaan fasilitasi :

1. Keterlibatan TPMPD/ pemangku kepentingan belum maksimal.
2. Lemahnya komitmen Kepala Sekolah terhadap pelaksanaan SPMI
3. Sering terjadi pergantian kepala sekolah sehingga program/kegiatan pendampingan yang telah berjalan sedikit terhambat baik itu dalam proses maupun pertanggungjawaban administrasi.
4. Masih ada sekolah yang menganggap SPMI adalah tugas tambahan yang membebani sekolah akibat kurangnya pemahaman TPMPD tentang pentingnya SPMI.
5. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring akibat adanya pandemi covid-19 kurang efektif karena tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang bagus, keterbatasan penguasaan teknologi peserta dan pemahaman terhadap materi yang diberikan tidak sebaik pelaksanaan secara tatap muka.

Pelaksanaan fasilitasi yang dilaksanakan meskipun terdapat kendala seperti diatas tetapi dapat diatasi sehingga pelaksanaan fasilitasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Baik dari segi pendaan maupun dari segi waktu dan tenaga.

## **2. IKK2. Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk**

Persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara sekolah dari jenjang SD hingga SMA dengan kinerja terbaik dan terburuk dapat dilihat pada tabel jumlah sekolah berdasarkan interval perjenjang dibawah ini :

No	Jenjang	Didalam		Diluar		Jumlah Sekolah
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	SD	3131	95,7%	141	4,3%	3.272
2	SMA	343	91,7%	31	8,3%	374
3	SMP	978	92,0%	85	8,0%	1.063
<b>Total</b>		<b>4.452</b>	<b>94,5%</b>	<b>257</b>	<b>5,5%</b>	<b>4.709</b>

### Rekap jumlah sekolah berdasarkan interval per jenjang

Dari tabel diatas terlihat bahwa kesenjangan AKM untuk jenjang SD di provinsi Riau berada dibawah 5% yaitu 4,3%. Artinya terdapat 3.131 sekolah atau 95,7% satuan pendidikan jenjang SD yang berada didalam kriteria menurut grafik distribusi normal. Namun untuk jenjang SMP dan SMA masih berada diatas 5% yaitu 8,3% dan 8%. Hal ini dimungkinkan terjadi karena sebab-sebab yang telah disebutkan diatas.

Sebaran kesenjangan hasil AKM perkabupaten/kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Kabupaten	Didalam		Diluar		Jumlah Sekolah
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kab. Bengkalis	418	93,7%	28	6,3%	446
2	Kab. Indragiri Hilir	524	91,3%	50	8,7%	574
3	Kab. Indragiri Hulu	241	93,1%	18	6,9%	259
4	Kab. Kampar	597	92,8%	46	7,2%	643
5	Kab. Kepulauan Meranti	217	96,0%	9	4,0%	226
6	Kab. Kuantan Singingi	324	97,0%	10	3,0%	334
7	Kab. Pelalawan	261	97,4%	7	2,6%	268
8	Kab. Rokan Hilir	480	94,9%	26	5,1%	506

9	Kab. Rokan Hulu	485	95,3%	24	4,7%	509
10	Kab. Siak	354	97,8%	8	2,2%	362
11	Kota Dumai	149	94,3%	9	5,7%	158
12	Kota Pekanbaru	402	94,8%	22	5,2%	424
<b>Total</b>		<b>4452</b>	<b>94,5%</b>	<b>257</b>	<b>5,5%</b>	<b>4.709</b>

**Tabel Rekap jumlah sekolah berdasarkan interval per kabupaten/kota**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kesenjangan AKM dengan nilai kurang atau sama dengan 5% adalah Kabupaten Kepulauan Meranti 4%, Kabupaten Kuantan Singingi 3%, Kabupaten Pelalawan 2,6%, Kabupaten Rokan Hulu 4,7% dan Kabupaten Siak 2,2%. 7 Kabupaten/kota lainnya memiliki kesenjangan AKM diatas 5% dengan nilai kesenjangan AKM tertinggi terdapat pada Kabupaten Indragiri Hilir 8,7%. Beberapa penyebab hal ini adalah :

1. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki jumlah satuan pendidikan terbanyak di Provinsi Riau.
2. Demografi wilayah Kabupaten Indragiri Hilir termasuk kedalam wilayah sulit.
3. Masih banyak satuan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir yang belum memiliki infrastruktur listrik dan berada diluar jangkauan sinyal komunikasi/internet.

Kesenjangan AKM perjenjang di setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Kabupaten	SD		SMP		SMA		Jumlah Sekolah
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kab. Bengkalis	298	96,4%	83	87,4%	37	88,1%	418

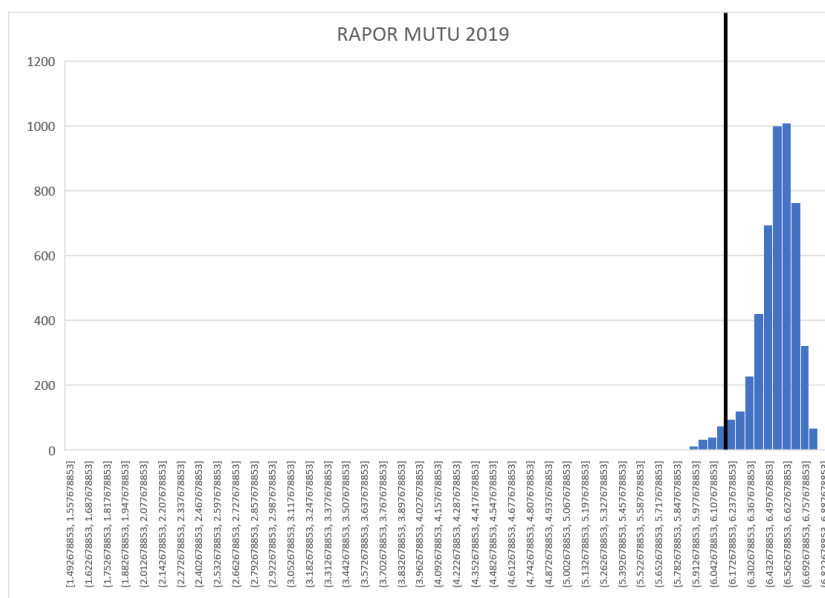
2	Kab. Indragiri Hilir	391	92,2%	108	87,8%	25	92,6%	524
3	Kab. Indragiri Hulu	180	93,3%	37	92,5%	24	92,3%	241
4	Kab. Kampar	444	93,5%	111	90,2%	42	93,3%	597
5	Kab. Kepulauan Meranti	155	96,3%	42	93,3%	20	100,0%	217
6	Kab. Kuantan Singingi	240	98,8%	66	91,7%	18	94,7%	324
7	Kab. Pelalawan	184	98,9%	62	95,4%	15	88,2%	261
8	Kab. Rokan Hilir	325	95,9%	107	92,2%	48	94,1%	480
9	Kab. Rokan Hulu	338	96,0%	116	92,8%	31	96,9%	485
10	Kab. Siak	228	98,7%	99	97,1%	27	93,1%	354
11	Kota Dumai	102	96,2%	36	97,3%	11	73,3%	149
12	Kota Pekanbaru	246	97,2%	111	92,5%	45	88,2%	402
<b>Total</b>		<b>3131</b>		<b>978</b>		<b>343</b>		<b>4.4</b>

#### **Rekap sekolah di interval dalam berdasarkan jenjang dan kabupaten kota**

Dari tabel diatas dapat kita lihat kesenjangan AKM jenjang SD yang berada diatas 5% adalah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 7,8%. Kesenjangan AKM jenjang SMP yang berada diatas 5% adalah Kabupaten Bengkalis yaitu 12,6% dan kesenjangan AKM jenjang SMA yang berada diatas 5% adalah Kabupaten Bengkalis yaitu 11,9%.

Penyebab kesenjangan AKM yang begitu besar di kabupaten Indragiri Hilir adalah karena permasalahan yang telah disebutkan diatas. Adapun penyebab kesenjangan AKM yang besar di Kabupaten Bengkalis adalah karena kekurangan tenaga pengawas. Banyak pengawas di Kabupaten Bengkalis yang menjadi pengawas pembina satuan pendidikan lebih banyak dari yang semestinya.

Kesenjangan hasil AKM dan survey karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan terburuk dilihat dari hasil rapor mutu sekolah tahun 2019 sebanyak 4654 sekolah dengan batasan bawah rapor mutu sebesar 6,133 dan batas atasnya 6,75. Jumlah sekolah yang berada pada rentang tersebut adalah 4468 sekolah sedangkan diluar batasan tersebut sebanyak 186 sekolah, dengan kata lain persentase kesenjangan hasil AKM dan survey karakternya adalah sebesar 4% dari sekolah yang memiliki rapor mutu.



Grafik Sebaran Data Rapor Mutu Provinsi Riau Tahun 2019

Dalam pengisian rapor mutu ini, sekolah didampingi oleh pengawas melalui aktivitas supervise yang mereka lakukan kepada sekolah binaannya. Sekolah yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP Tahun 2020 adalah sebanyak 3607 sekolah dari 5693 sekolah yang ada di provinsi Riau (Berdasarkan data aplikasi *SEMAMPAI* tanggal 17 November 2020). Guna terlaksananya supervise mutu ke sekolah oleh pengawas, LPMP Provinsi Riau melakukan rangkaian kegiatan supervisi mutu yang meliputi:

- a. Penyusunan Bahan Supervisi Penjaminan Mutu

Di kegiatan ini dilakukan penyusunan bahan supervise mutu berdasarkan empat aspek (SPMI, Proses Pembelajaran, Manajemen Sekolah, dan Kompetensi Lulusan) dimasa pandemi COVID – 19 melalui enam kali pertemuan rapat dalam kantor yang melibatkan pengawas sekolah jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Kota Pekanbaru. Hasil kegiatan ini adalah Instrumen supervise mutu, pola bimbingan teknis, dan pelaporan hasil supervise mutu oleh pengawas. Kendala pelaksanaan kegiatan ini, sebaiknya dilakukan uji coba instrument sebelum digunakan oleh pengawas.

b. Bimbingan Teknis Supervisi Mutu Bagi Pengawas Sekolah

Kegiatan ini dilaksanakan di kabupaten/kota dengan mengundang pengawas sekolah jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Pola kegiatan ini adalah tatap muka sebanyak 7 Jam dengan materi yang bermuatan substansi supervise mutu dan penjelasan teknis yang berkaitan pelaksanaan supervise mutu selain kebijakan penjaminan mutu. Kebijakan penjaminan mutu ini disampaikan oleh *stakeholder* dari Dinas Pendidikan Kab/Kota, sementara materi substansi disampaikan oleh fasilitator nasional/daerah. Kendalanya pengawas ragu kapan sebaiknya mulai melakukan supervise mutu sehingga diperlukan penegasan kepada pengawas kapan jadwal dimulainya kegiatan.

c. Supervisi ke Satuan Pendidikan

Kegiatan ini dimulai dengan melakukan video conference dengan seluruh pengawas di provinsi Riau untuk membicarakan teknis pelaksanaan pendampingan supervise. Untuk pendampingan supervise tatap muka ini sarannya sebanyak 400 sekolah binaan dari 400 pengawas sekolah. Kendala kegiatan ini adalah kurang waktu dan SDM untuk melakukan pendampingan ke seluruh pengawas di 400 sekolah tersebut.

d. Analisis Hasil Supervisi

Kegiatan ini dimulai dari penarikan data pelaporan aplikasi SEMAMPAI yang kemudian dianalisis dengan melibatkan perwakilan pengawas kabupaten/kota dari semua jenjang dalam bentuk workshop analisis hasil supervisi. Dimana pada kegiatan tersebut pengawas melakukan analisis terhadap pelaksanaan supervise mutu disemua sekolah sampai menghasilkan rekomendasi berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi SEMAMPAI.

**3. IKK 3. Persentase Kabupaten/Kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan.**

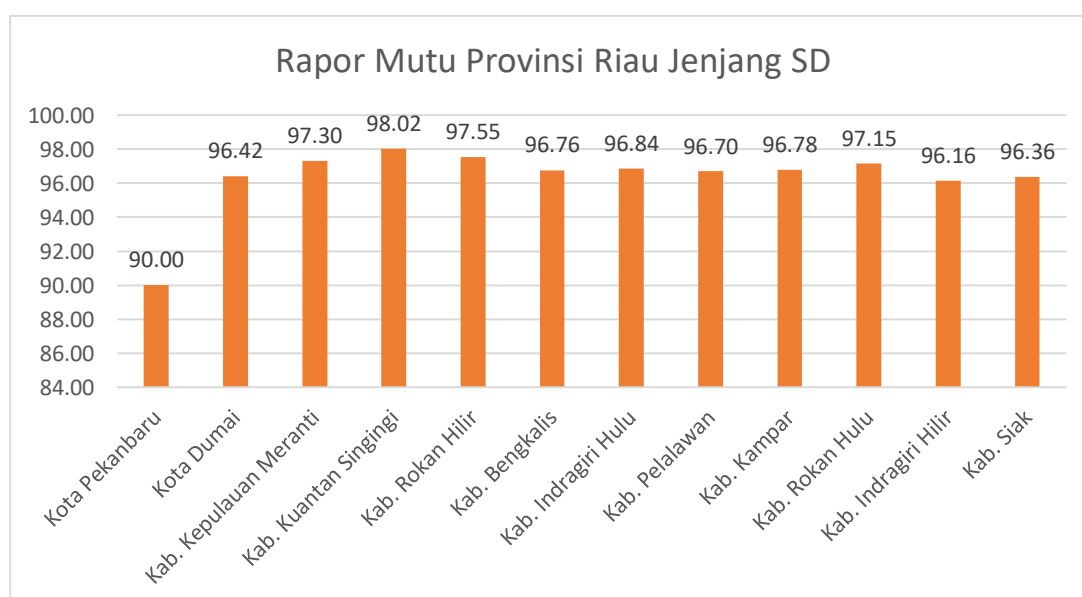
**3.1. Data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan**

Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

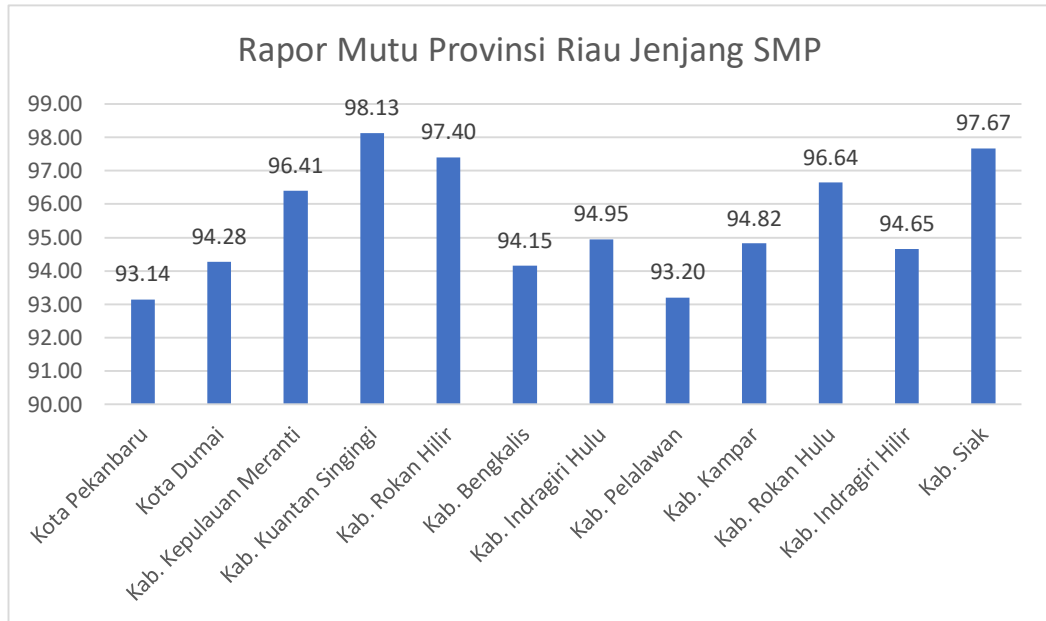
Tabel 1: Persentase Rapor Mutu pada DAPODIK Dasmen Tahun 2019

No.	Kabupaten/Kota	Rapor SD	Rapor SMP	Rapor SMA
1.	Kota Pekanbaru	90,00	93,14	93,87
2.	Kota Dumai	96,42	94,28	96,49
3.	Kab. Kepulauan Meranti	97,30	96,41	97,13
4.	Kab. Kuantan Singingi	98,02	98,13	97,63
5.	Kab. Rokan Hilir	97,55	97,40	96,23
6.	Kab. Bengkalis	96,76	94,15	95,03
7.	Kab. Indragiri Hulu	96,84	94,95	93,81
8.	Kab. Pelalawan	96,70	93,20	96,03
9.	Kab. Kampar	96,78	94,82	94,65
10.	Kab. Rokan Hulu	97,15	96,64	97,96
11.	Kab. Indragiri Hilir	96,16	94,65	96,70
12.	Kab. Siak	96,36	97,67	96,93
	Rata – Rata	96,34	95,46	96,04

Berdasarkan tabel di atas, grafik rapor mutu per jenjang dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat digambarkan sebagai berikut:

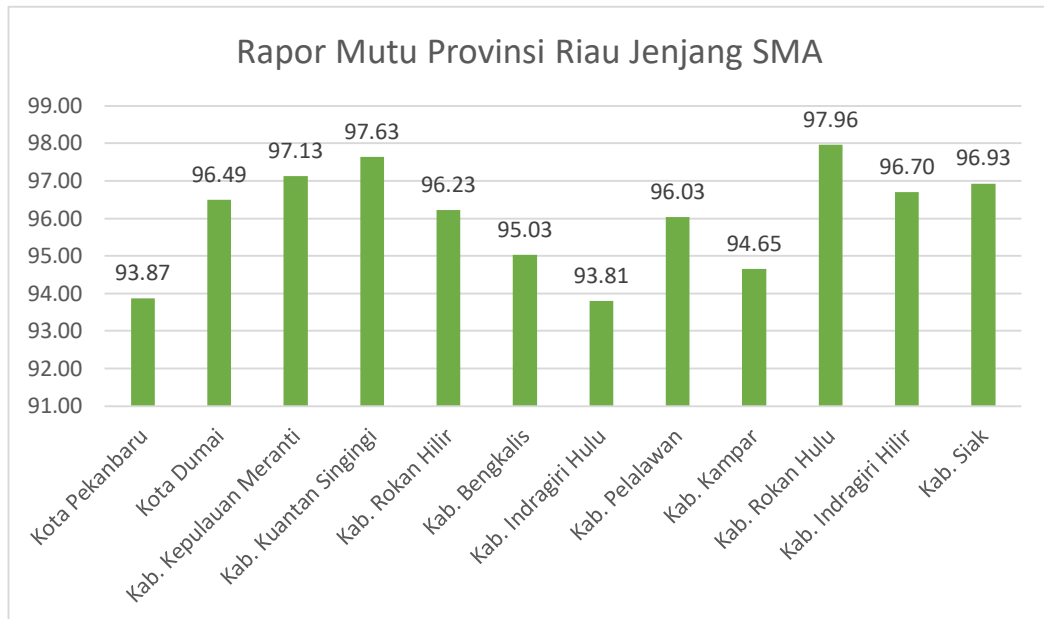


Rata-rata capaian rapor mutu jenjang SD di Provinsi Riau sebesar 96,34%. Capaian tertinggi 98,02% diperoleh Kabupaten Kuantan Singingi dan capaian terendah 90% diperoleh Kota Pekanbaru.



Rata-rata capaian rapor mutu jenjang SMP di Provinsi Riau sebesar 95,46%. Capaian tertinggi 98,13% diperoleh Kabupaten Kuantan Singingi dan capaian terendah 93,14% diperoleh Kota Pekanbaru.





Rata-rata capaian rapor mutu jenjang SMA di Provinsi Riau sebesar 96,04%. Capaian tertinggi 97,96% diperoleh Kabupaten Rokan Hulu dan capaian terendah 93,81% diperoleh Kabupaten Indragiri Hulu.

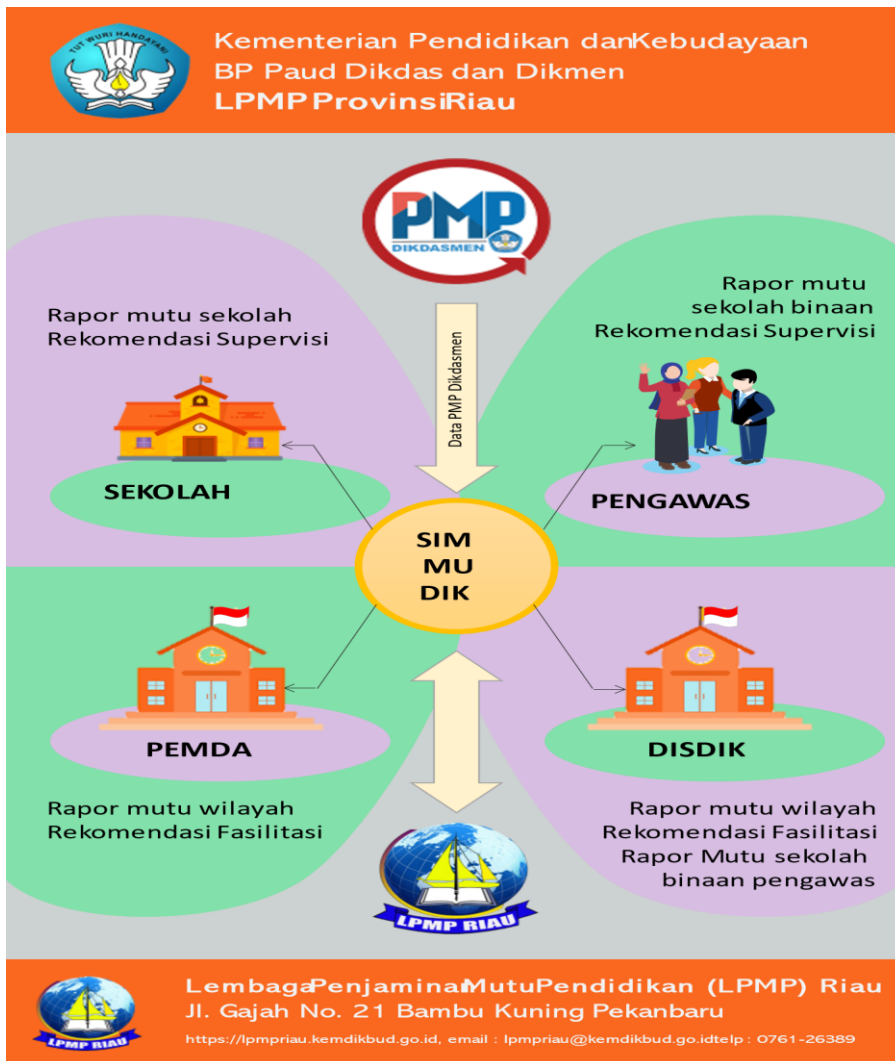
### 3.2. Aplikasi Penunjang Layanan

Untuk menunjang tugas lembaga LPMP membuat berbagai aplikasi untuk mendukung layanan internal maupun eksternal. Dari aplikasi yang sudah dibuat oleh tim pengembang LPMP Provinsi Riau berhasil :

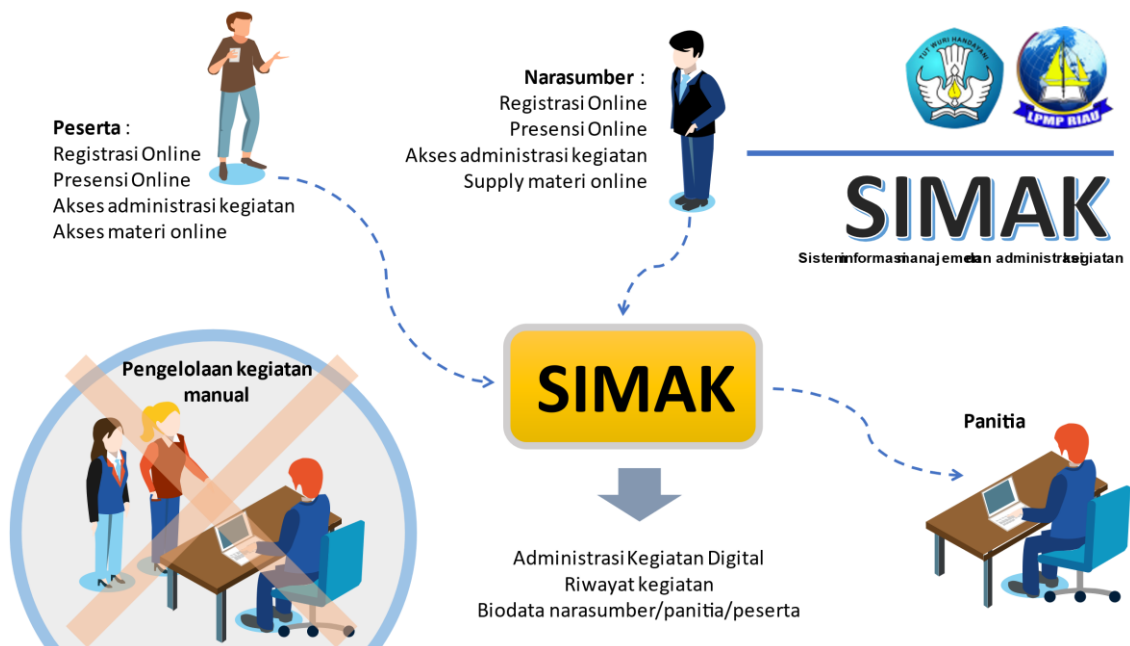
- a. membawa LPMP diusulkan WBBM di tahun 2020.
- b. Efektifitas dan efisiensi dalam memberikan layanan terhadap stake holder karena menghemat waktu tenaga dan biaya bagi stake holder yang ingin datang ke LPMP Provinsi Riau.
- c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan supervise mutu Pendidikan sehingga lebih berstandar dan terdokumentasi dalam bentuk digital.
- d. Memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi supervise.

Berikut alur penggunaan masing-masing aplikasi:

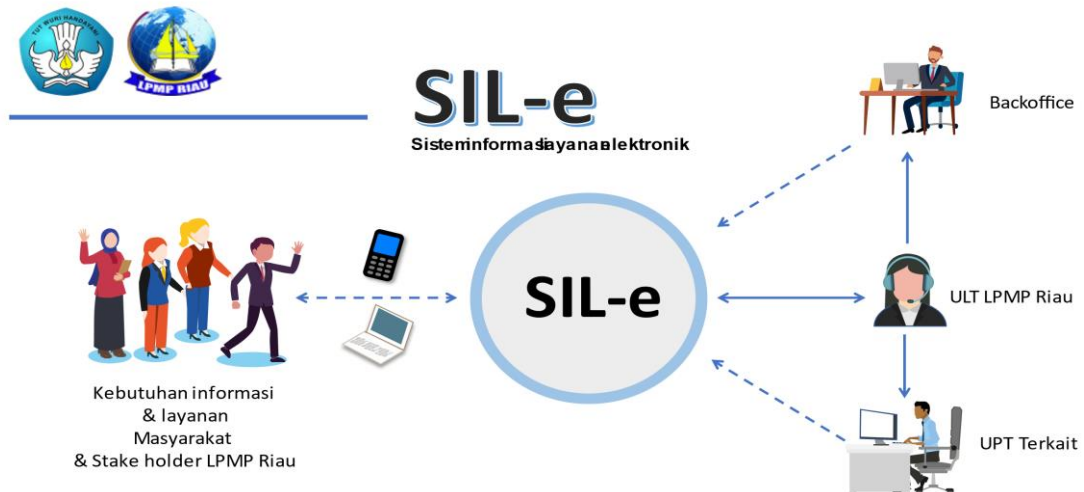
1. Aplikasi Sisitem Informasi Komunikasi Mutu Pendidikan (SIMMUDIK)



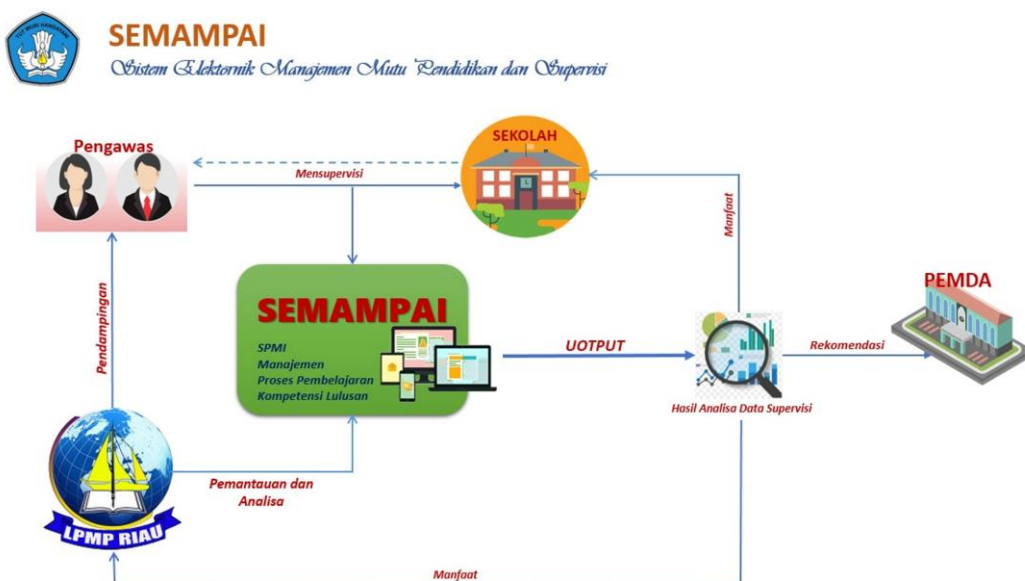
2. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kegiatan (SIMAK)



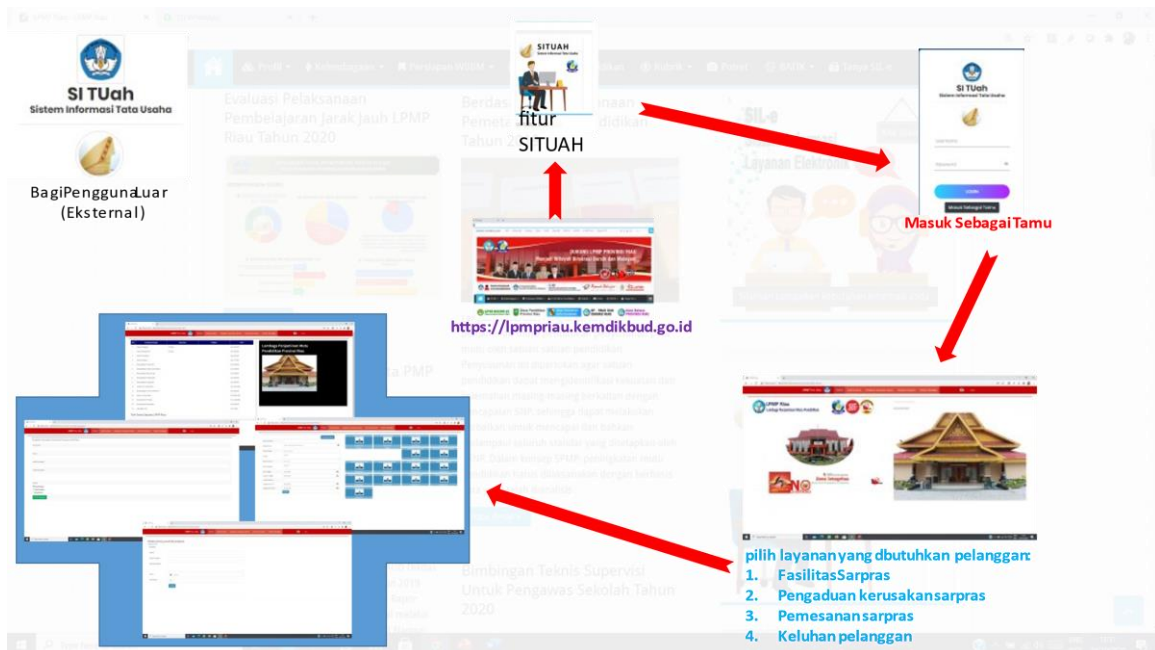
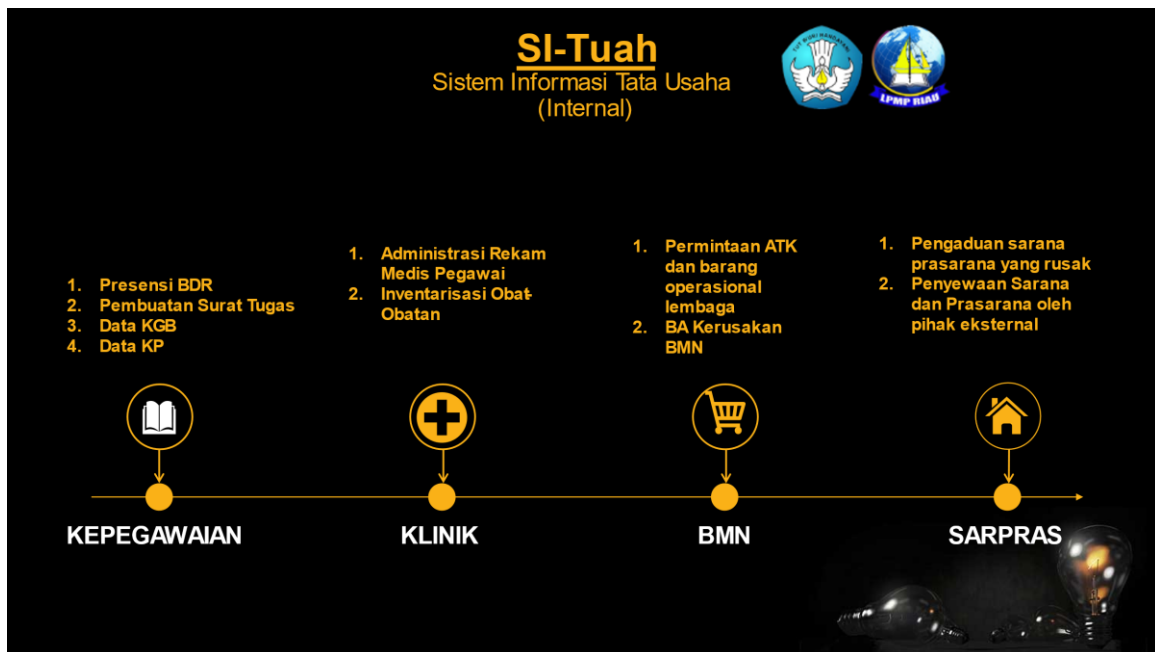
### 3. Aplikasi Sistem Informasi Layanan Elektronik (SIL-e)



### 4. Aplikasi Sistem Elektronik Manajemen Mutu Pendidikan dan Supervisi (SEMAMPAI)



## 5. Aplikasi Sistem Informasi Tata Usaha (SITUAH)



### 3.3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Layanan internal terkait dengan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, dan Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan. Pagu layanan sarana dan

prasarana internal sebesar 729.486.000. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar 684.962.200 atau persentase penyerapan anggaran sebesar 93,9%

#### 3.4. Layanan Dukungan Manajemen Satker

Pagu Layanan Dukungan Manajemen Satker sebesar 1.931.518.000,- Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar 1.872.415.529,- atau persentase penyerapan anggaran sebesar 96,94%

#### 3.5. Layanan Perkantoran

Pagu Layanan perkantoran sebesar 15.375.252.000,- Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar 14.964.283.268,- atau persentase penyerapan anggaran sebesar 97,33%

### B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran LPMP Provinsi Riau untuk tahun 2020 setelah direvisi terakhir berjumlah Rp 23.236.885.000,- dengan realisasi di akhir tahun mencapai Rp 22.394.885.968,- atau 96,38% dari total anggaran. Rincian capaian keuangan dari setiap output disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Realisasi Anggaran LPMP Provinsi Riau Tahun 2020

Kode	Uraian	Total		
		Alokasi	Realisasi	%
5630.001	Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya	378.101.000	368.991.285	97,59
5630.002	Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP	1.392.025.000	1.284.992.253	92,31

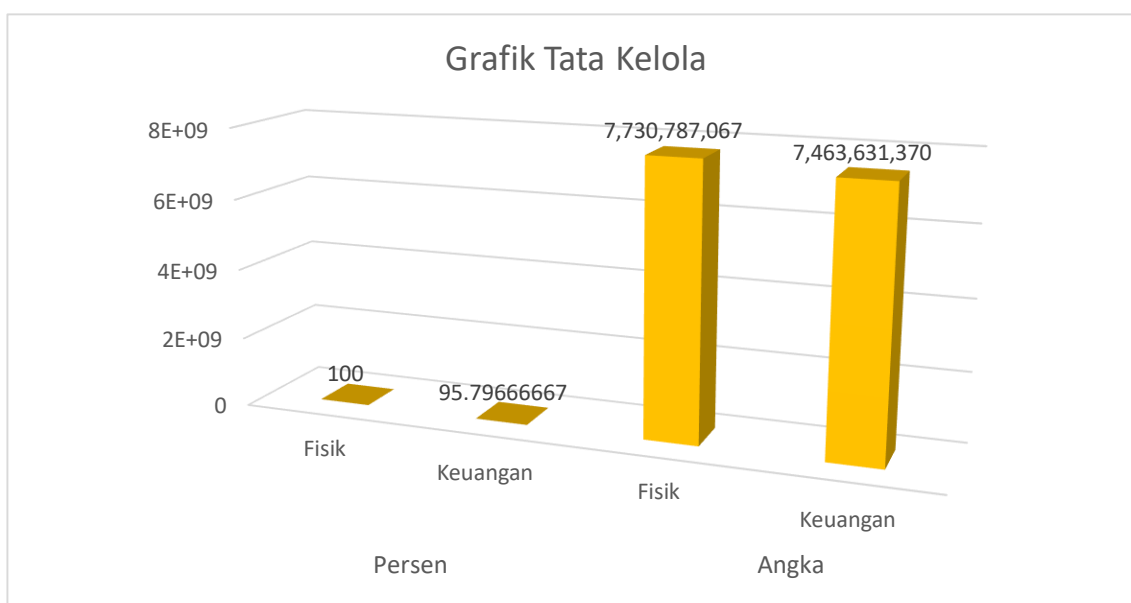
Kode	Uraian	Total		
		Alokasi	Realisasi	%
5630.003	Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	2.613.646.000	2.413.117.276	92,33
5630.004	Satuan Pendidikan yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya	816.857.000	806.124.158	98,69
5630.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	729.486.000	684.962.200	93,9
5630.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.931.518.000	1.872.415.529	96,94
5630.994	Layanan Perkantoran	15.375.252.000	14.964.283.268	97,33
	<b>T O T A L</b>	<b>23.236.885.000</b>	<b>22.394.885.969</b>	<b>96,38</b>

Tata kelola LPMP Provinsi Riau yang baik dapat diwujudkan melalui peningkatan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2020 termasuk kategori A dengan Nilai 80,51 dan peningkatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan nilai 98,15. Realisasi pelaksanaan Anggaran tahun 2020 tergambar pada tabel Realisasi Tatakelola di bawah ini:

Tabel 2. Realisasi Tatakelola LPMP Provinsi Riau

Persen		Angka	
Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
100	95,80	7.730.787.067	7.463.631.370

Berdasarkan tabel di atas, grafik Realisasi Tatakelola LPMP Provinsi Riau dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan grafik tata kelola LPMP Provinsi Riau anggaran tahun 2020, disimpulkan bahwa sampai dengan bulan Desember 2020 kondisi capaian antara realisasi keuangan dengan harapan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi Riau tahun 2020 tidak tercapai secara keseluruhan. Hal ini disebabkan adanya efisiensi harga setiap pekerjaan dari alokasi anggaran keseluruhan serta adanya pemotongan tunjangan kinerja pegawai terutama terkait dengan potongan kehadiran setiap bulannya.

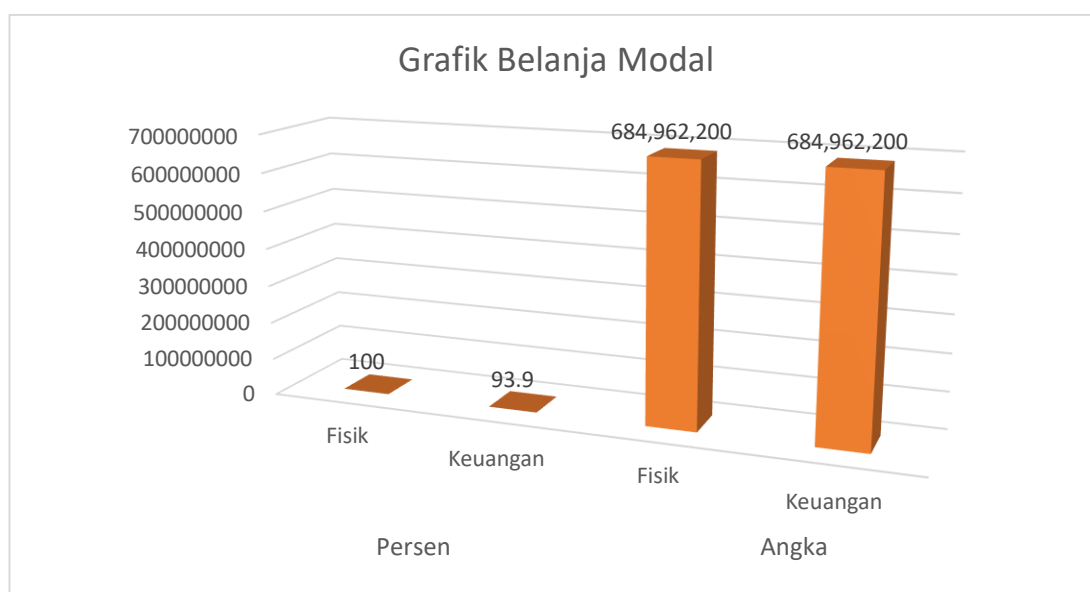
### a. Belanja Modal

Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya di tahun 2020 tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Realisasi Belanja Modal LPMP Provinsi Riau

Persen		Angka	
Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
100	93,90	684.962.200	684.962.200

Grafik Realisasi Belanja Modal LPMP Provinsi Riau dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi fisik belanja modal sebesar 100%. Realisasi keuangan belanja modal sebesar 93,90% atau Rp. 684.962.200,-. Hal ini terjadi karena adanya efisiensi harga setiap pekerjaan dari alokasi anggaran keseluruhan, yaitu dari penawaran penyedia dan negosiasi harga dengan penyedia.



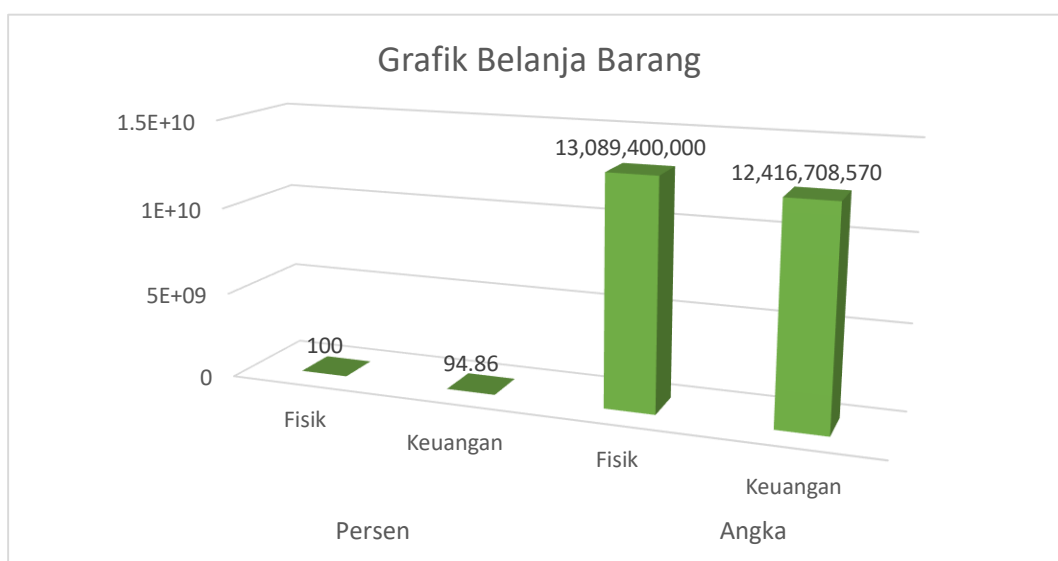
b. **Belanja Barang**

Pembelian barang dan jasa yang habis pakai di tahun 2020 tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Realisasi Belanja Barang LPMP Provinsi Riau

Persen		Angka	
Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
100	94,86	13.089.400.000	12.416.708.570

Grafik Realisasi Belanja Barang LPMP Provinsi Riau dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi fisik belanja barang sebesar 100%. Realisasi keuangan belanja barang sebesar 96,54% atau Rp. 12.416.708.570,-. Hal ini terjadi karena adanya efisiensi harga setiap belanja yang dilakukan dari alokasi anggaran keseluruhan, yaitu dari penawaran penyedia dan negosiasi harga dengan penyedia.

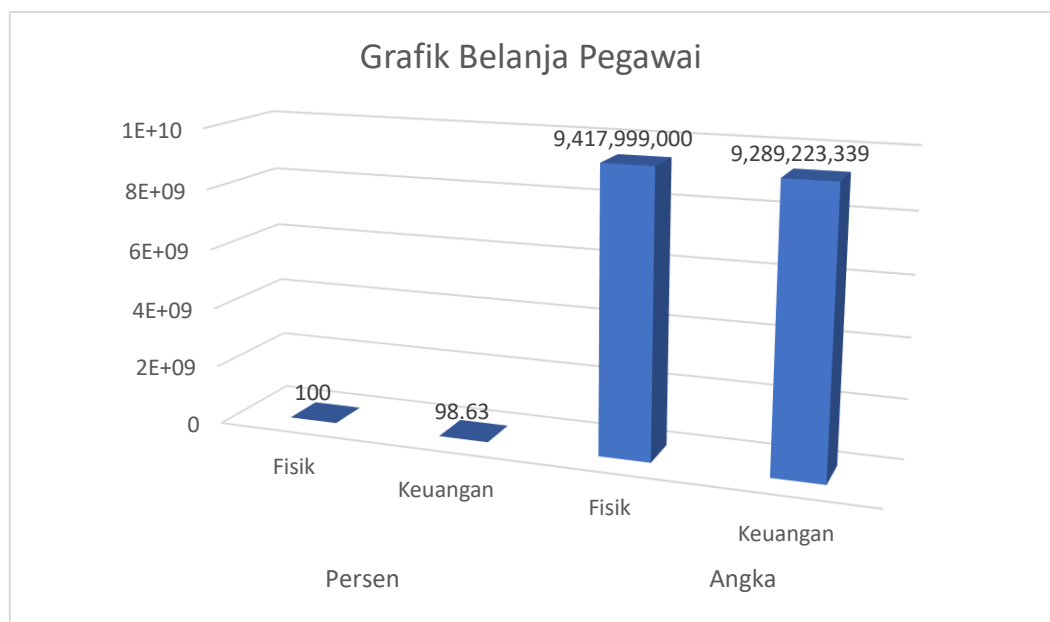
### c. Belanja Pegawai

Realisasi atas kompensasi yang diberikan kepada ASN dan PPNPN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi di LPMP Provinsi Riau tergambar pada table di bawah ini:

Tabel 5. Realisasi Belanja Pegawai LPMP Provinsi Riau

Persen		Angka	
Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan
100	98,63	9.417.999.000	9.289.223.339

Grafik Realisasi Belanja Pegawai LPMP Provinsi Riau dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa ketercapaian realisasi fisik belanja pegawai LPMP Provinsi Riau adalah sebesar 100%. Realisasi keuangan belanja pegawai adalah 98,63% atau 9.289.223.339,-. Hal ini terjadi karena adanya pemotongan tunjangan kinerja pegawai sesuai dengan capaian kinerja pegawai terutama terkait dengan potongan kehadiran setiap bulannya.

Realisasi keuangan tidak tercapai secara keseluruhan, terjadi karena adanya efisiensi harga setiap pekerjaan dari alokasi anggaran keseluruhan, yaitu dari penawaran penyedia dan negosiasi harga dengan penyedia.



## **A. Simpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja LPMP Provinsi Riau tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan LPMP Provinsi Riau kepada semua elemen masyarakat dan pemangku kebijakan yang menjadi *stakeholders* dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Riau selama tahun 2020. Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya LPMP Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan di Wilayah Provinsi Riau yang tergambar dalam Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) LPMP Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

Secara umum kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPMP) Riau tahun Anggaran 2020 sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan yang direncanakan walau ada perubahan-perubahan yang bertujuan untuk memaksimalkan kegiatan dalam rangka tercapainya *output* Program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Kontrak Kinerja lembaga dengan Kementerian dalam hal ini dengan Dirjen Dikdasmen. Hal ini dapat tergambar dalam capaian sasaran kegiatan mencapai 99,86 % dan realisasi serapan keuangan 96,9 %.

## **B. Saran**

1. Agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan lebih cepat dan maksimal diawal tahun sebaiknya juknis kegiatan dari pusat lebih awal diberikan kepada LPMP, jika memungkinkan juknis ataupun juklak dibuat sendiri oleh LPMP Provinsi Riau, sehingga ada gambaran awal terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan tanpa harus menunggu dari pusat.
2. Pembukaan blokir anggaran sebaiknya dipercepat, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan lebih baik dan lebih cepat.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan atau *stakeholder* agar kegiatan lebih terlaksana dengan baik dan maksimal baik kuantitas maupun kualitas.
4. Perlunya dukungan dan kerjasama seluruh pegawai dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan dapat berjalan lebih baik.

# LAMPIRAN



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**  
**Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)**  
**Riau**  
**dengan**  
**Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,**  
**Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YUDI NURMAN  
Jabatan : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Riau  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMID MUHAMMAD  
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan  
Pendidikan Menengah  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2020  
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu  
Pendidikan (LPMP) Riau,

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan  
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah,

HAMID MUHAMMAD

YUDI NURMAN

## TARGET KINERJA

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	<p>1.1. Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75</p> <p>1.2. Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk</p> <p>1.3. Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan</p>	<p>26,5 %</p> <p>5,0%</p> <p>95,0%</p>
2.	Terwujudnya Tata Kelola LPMP yang baik	<p>2.1. Predikat SAKIP LPMP Riau</p> <p>2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL</p>	<p>BB</p> <p>81</p>

## KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan/Output	Anggaran
1.	Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya	378.101.000
2.	Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP	1.700.025.000
3.	Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	2.549.546.000
4.	Satuan Pendidikan yang terverifikasi Mutu Pendidikannya	1.128.653.000
5.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	729.486.000
6.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	2.115.822.000
7.	Layanan Perkantoran	17.500.172.000
	Jumlah	26.101.805.000

Jakarta, Juni 2020

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan  
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah,

HAMID MUHAMMAD

Kepala Lembaga Penjaminan  
Mutu Pendidikan (LPMP)  
Riau,

YUDI NURMAN



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**  
**Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau**  
**dengan**  
**Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudi Nurman, S.Pd., M.B.A

Jabatan : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Jumeri, S.TP, M.Si

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

Jumeri, S.TP, M.Si

Jakarta, Agustus 2020  
Kepala Lembaga Penjaminan  
Mutu Pendidikan Provinsi Riau

Yudi Nurman, S.Pd., M.B.A



2009170542547



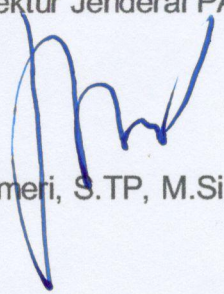
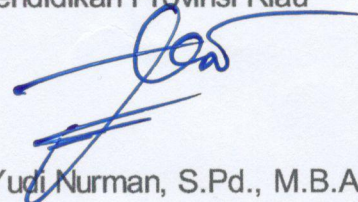
**TARGET KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	
1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1.1	Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) minimal 75	%	26,50
		1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5,00
		1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,00

**KEGIATAN DAN ANGGARAN**

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5630	Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	26.101.805.000
<b>TOTAL</b>			<b>26.101.805.000</b>

Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

  
(Jumeri, S.TP, M.Si)Jakarta, Agustus 2020  
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu  
Pendidikan Provinsi Riau  
(Yudi Nurman, S.Pd., M.B.A)

2009170542547



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**  
**Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau**  
**dengan**  
**Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudi Nurman, S.Pd., M.B.A

Jabatan : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Jumeri, S.TP, M.Si


Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

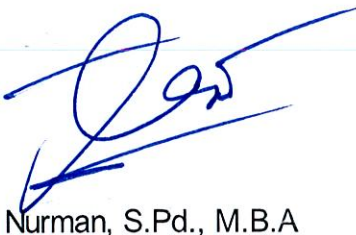
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

Jakarta, November 2020  
Kepala Lembaga Penjaminan  
Mutu Pendidikan Provinsi Riau



Jumeri, S.TP, M.Si



Yudi Nurman, S.Pd., M.B.A



2012021541385

**TARGET KINERJA**

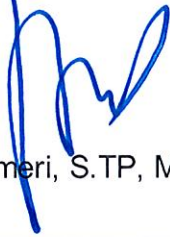
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	
1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1.1	Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card) minimal 75	%	26,50
		1.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5,00
		1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95,00

**KEGIATAN DAN ANGGARAN**

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5630	Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	24.004.674.000
<b>TOTAL</b>			<b>24.004.674.000</b>

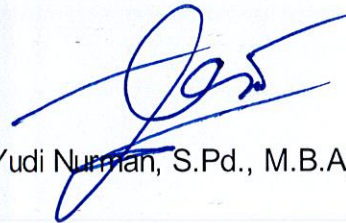
Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

(Jumeri, S.TP, M.Si)



Jakarta, November 2020  
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau

(Yudi Nurman, S.Pd., M.B.A)




2012021541385

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN  
Bulan: Januari 2020 - Desember 2020

Format : B.19  
Nama Satker : LPMP RIAU

Dana DIPA : Rp 23.236.885.000  
Realisasi : Rp 22.394.885.968  
Keuangan : 96,38%  
Fisik :

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Belanja Bansos		Total				Blokir	
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran		
419526	LPMP RIAU					9.417.999.000	9.292.465.198	13.089.400.000	12.417.458.570	729.486.000	684.962.200	0	0	23.236.885.000	22.394.885.968	96,38	841.999.032	0	1. Satker
03	DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH					9.417.999.000	9.292.465.198	13.089.400.000	12.417.458.570	729.486.000	684.962.200	0	0	23.236.885.000	22.394.885.968	96,38	841.999.032	0	2. Unit
03.06	Program Pendidikan PAUD, Dasar dan Menengah					9.417.999.000	9.292.465.198	13.089.400.000	12.417.458.570	729.486.000	684.962.200	0	0	23.236.885.000	22.394.885.968	96,38	841.999.032	0	3. Program
5630	Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan					9.417.999.000	9.292.465.198	13.089.400.000	12.417.458.570	729.486.000	684.962.200	0	0	23.236.885.000	22.394.885.968	96,38	841.999.032	0	4. Kegiatan
5630.001	Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya	Sekolah	5.588	5.588	100,00	0	0	378.101.000	368.991.285	0	0	0	0	378.101.000	368.991.285	97,59	9.109.715	0	5. Output
5630.001.002	Sekolah Terpetakan Mutu Pendidikan					0	0	378.101.000	368.991.285	0	0	0	0	378.101.000	368.991.285	97,59	9.109.715	0	6. Sub Output
052	Analisis Data Mutu					0	0	34.632.000	34.632.000	0	0	0	0	34.632.000	34.632.000	100,00	0	0	7. Komponen
052.V	Analisis Data Mutu melalui Daring					0	0	34.632.000	34.632.000	0	0	0	0	34.632.000	34.632.000	100,00	0	0	8. Sub
521211	Belanja Bahan					0	0	5.832.000	5.832.000	0	0	0	0	5.832.000	5.832.000	100,00	0	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	28.800.000	28.800.000	0	0	0	0	28.800.000	28.800.000	100,00	0	0	9. Akun
053	Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu					0	0	116.472.000	116.471.300	0	0	0	0	116.472.000	116.471.300	100,00	700	0	7. Komponen
053.V	Penyusunan rekomendasi peningkatan mutu					0	0	116.472.000	116.471.300	0	0	0	0	116.472.000	116.471.300	100,00	700	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	6.222.000	6.221.300	0	0	0	0	6.222.000	6.221.300	99,99	700	0	9. Akun
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					0	0	2.050.000	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000	2.050.000	100,00	0	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	7.100.000	7.100.000	0	0	0	0	7.100.000	7.100.000	100,00	0	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	101.100.000	101.100.000	0	0	0	0	101.100.000	101.100.000	100,00	0	0	9. Akun
054	Diseminasi Pemetaan Mutu					0	0	226.997.000	217.887.985	0	0	0	0	226.997.000	217.887.985	95,99	9.109.015	0	7. Komponen
054.V	Diseminasi Pemetaan Mutu melalui Daring					0	0	226.997.000	217.887.985	0	0	0	0	226.997.000	217.887.985	95,99	9.109.015	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	48.437.000	44.402.985	0	0	0	0	48.437.000	44.402.985	91,67	4.034.015	0	9. Akun
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					0	0	2.650.000	2.650.000	0	0	0	0	2.650.000	2.650.000	100,00	0	0	9. Akun
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	11.400.000	6.325.000	0	0	0	0	11.400.000	6.325.000	55,48	5.075.000	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	12.300.000	12.300.000	0	0	0	0	12.300.000	12.300.000	100,00	0	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	152.210.000	152.210.000	0	0	0	0	152.210.000	152.210.000	100,00	0	0	9. Akun
5630.002	Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP	Sekolah	5.588	5.588	100,00	0	0	1.392.025.000	1.284.992.253	0	0	0	0	1.392.025.000	1.284.992.253	92,31	107.032.747	0	5. Output
5630.002.001	Sekolah yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP					0	0	1.392.025.000	1.284.992.253	0	0	0	0	1.392.025.000	1.284.992.253	92,31	107.032.747	0	6. Sub Output
051	Penyusunan Program Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan					0	0	66.521.000	62.656.000	0	0	0	0	66.521.000	62.656.000	94,19	3.865.000	0	7. Komponen

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Belanja Bansos		Total				Blokir	
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran		
051.V	Penyusunan Bahan Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan					0	0	66.521.000	62.656.000	0	0	0	0	66.521.000	62.656.000	94,19	3.865.000	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	14.321.000	10.476.000	0	0	0	0	14.321.000	10.476.000	73,15	3.845.000	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	52.200.000	52.180.000	0	0	0	0	52.200.000	52.180.000	99,96	20	0	9. Akun
052	Bimbingan Teknis Supervisi					0	0	635.132.000	568.537.228	0	0	0	0	635.132.000	568.537.228	89,51	66.594.772	0	7. Komponen
052.B	Bimbingan Teknis Supervisi untuk Pengawas Sekolah					0	0	9.575.000	9.574.300	0	0	0	0	9.575.000	9.574.300	99,99	700	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	8.825.000	8.824.300	0	0	0	0	8.825.000	8.824.300	99,99	700	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	600	600	0	0	0	0	600	600	100,00	0	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	150	150	0	0	0	0	150	150	100,00	0	0	9. Akun
052.C	Benchmarking Pengelolaan Supervisi					0	0	37.344.000	35.205.058	0	0	0	0	37.344.000	35.205.058	94,27	2.138.942	0	8. Sub
521211	Belanja Bahan					0	0	2.138.000	0	0	0	0	0	2.138.000	0	0,00	2.138.000	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Biasa					0	0	35.206.000	35.205.058	0	0	0	0	35.206.000	35.205.058	100,00	942	0	9. Akun
052.V	Bimbingan Teknis Supervisi untuk Pengawas Sekolah					0	0	588.213.000	523.757.870	0	0	0	0	588.213.000	523.757.870	89,04	64.455.130	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	122.455.000	121.539.470	0	0	0	0	122.455.000	121.539.470	99,25	915.53	0	9. Akun
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					0	0	32.600.000	21.400.000	0	0	0	0	32.600.000	21.400.000	65,64	11.200.000	0	9. Akun
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	59.700.000	10.255.000	0	0	0	0	59.700.000	10.255.000	17,18	49.445.000	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	41.400.000	38.550.000	0	0	0	0	41.400.000	38.550.000	93,12	2.850.000	0	9. Akun
524119	Belanja Perjalanan Lainnya					0	0	332.058.000	332.013.400	0	0	0	0	332.058.000	332.013.400	99,99	44.6	0	9. Akun
053	Supervisi Satuan Pendidikan					0	0	536.911.000	502.953.350	0	0	0	0	536.911.000	502.953.350	93,68	33.957.650	0	7. Komponen
053.V	Supervisi ke Satuan Pendidikan melalui Daring					0	0	536.911.000	502.953.350	0	0	0	0	536.911.000	502.953.350	93,68	33.957.650	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	41.261.000	20.882.750	0	0	0	0	41.261.000	20.882.750	50,61	20.378.250	0	9. Akun
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					0	0	16.400.000	16.400.000	0	0	0	0	16.400.000	16.400.000	100,00	0	0	9. Akun
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	24.650.000	24.560.000	0	0	0	0	24.650.000	24.560.000	99,63	90	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	32.400.000	19.800.000	0	0	0	0	32.400.000	19.800.000	61,11	12.600.000	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Biasa					0	0	403.750.000	403.310.600	0	0	0	0	403.750.000	403.310.600	99,89	439.4	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	18.450.000	18.000.000	0	0	0	0	18.450.000	18.000.000	97,56	450	0	9. Akun
054	Analisis Supervisi Mutu Pendidikan					0	0	153.461.000	150.845.675	0	0	0	0	153.461.000	150.845.675	98,30	2.615.325	0	7. Komponen
054.V	Analisis Data Mutu melalui Daring					0	0	153.461.000	150.845.675	0	0	0	0	153.461.000	150.845.675	98,30	2.615.325	0	8. Sub
521211	Belanja Bahan					0	0	34.945.000	34.305.675	0	0	0	0	34.945.000	34.305.675	98,17	639.325	0	9. Akun
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					0	0	2.350.000	2.050.000	0	0	0	0	2.350.000	2.050.000	87,23	300	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	10.500.000	8.900.000	0	0	0	0	10.500.000	8.900.000	84,76	1.600.000	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	105.666.000	105.590.000	0	0	0	0	105.666.000	105.590.000	99,93	76	0	9. Akun
5630.003	Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	Sekolah	1.2	1.2	100,00	0	0	2.613.646.000	2.413.117.276	0	0	0	0	2.613.646.000	2.413.117.276	92,33	200.528.724	0	5. Output
5630.003.001	Sekolah Yang Difasilitasi Melalui LPMP					0	0	2.186.683.000	2.044.610.801	0	0	0	0	2.186.683.000	2.044.610.801	93,50	142.072.199	0	6. Sub Output
051	Sosialisasi SPMI					0	0	262.005.000	260.643.900	0	0	0	0	262.005.000	260.643.900	99,48	1.361.100	0	7. Komponen
051.A	Sosialisasi SPMI					0	0	227.305.000	227.303.900	0	0	0	0	227.305.000	227.303.900	100,00	1.1	0	8. Sub
521211	Belanja Bahan					0	0	17.356.000	17.355.100	0	0	0	0	17.356.000	17.355.100	99,99	900	0	9. Akun
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					0	0	3.250.000	3.250.000	0	0	0	0	3.250.000	3.250.000	100,00	0	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	12.500.000	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	12.500.000	100,00	0	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	194.199.000	194.198.800	0	0	0	0	194.199.000	194.198.800	100,00	200	0	9. Akun

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Belanja Bansos		Total				Blokir	
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran		
051.V	Sosialisasi SPMPDM kepada sekolah binaan melalui Daring					0	0	34.700.000	33.340.000	0	0	0	0	34.700.000	33.340.000	96,08	1.360.000	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00	1.000.000	0	9. Akun
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					0	0	7.700.000	7.700.000	0	0	0	0	7.700.000	7.700.000	100,00	0	0	9. Akun
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	12.600.000	12.240.000	0	0	0	0	12.600.000	12.240.000	97,14	360	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	13.400.000	13.400.000	0	0	0	0	13.400.000	13.400.000	100,00	0	0	9. Akun
052	Bimbingan Teknis SPMI					0	0	167.608.000	163.016.658	0	0	0	0	167.608.000	163.016.658	97,26	4.591.342	0	7. Komponen
052.A	Penyusunan Program Bimtek dan Pendampingan SPMI					0	0	20.644.000	20.644.000	0	0	0	0	20.644.000	20.644.000	100,00	0	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	3.294.000	3.294.000	0	0	0	0	3.294.000	3.294.000	100,00	0	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	17.350.000	17.350.000	0	0	0	0	17.350.000	17.350.000	100,00	0	0	9. Akun
052.B	Bimbingan Teknis Sekolah Binaan yg Difasilitasi Direktorat di Kab/Kota					0	0	46.589.000	46.589.000	0	0	0	0	46.589.000	46.589.000	100,00	0	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	11.589.000	11.589.000	0	0	0	0	11.589.000	11.589.000	100,00	0	0	9. Akun
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					0	0	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000	100,00	0	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	3.050.000	3.050.000	0	0	0	0	3.050.000	3.050.000	100,00	0	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	30.200.000	30.200.000	0	0	0	0	30.200.000	30.200.000	100,00	0	0	9. Akun
052.C	Benchmarking Pengelolaan SPMI					0	0	56.171.000	51.585.658	0	0	0	0	56.171.000	51.585.658	91,84	4.585.342	0	8. Sub
521211	Belanja Bahan					0	0	4.585.000	0	0	0	0	0	4.585.000	0	0,00	4.585.000	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Biasa					0	0	51.586.000	51.585.658	0	0	0	0	51.586.000	51.585.658	100,00	342	0	9. Akun
052.V	Penyusunan program kerja sekolah binaan					0	0	44.204.000	44.198.000	0	0	0	0	44.204.000	44.198.000	99,99	6	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	7.404.000	7.398.000	0	0	0	0	7.404.000	7.398.000	99,92	6	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	36.800.000	36.800.000	0	0	0	0	36.800.000	36.800.000	100,00	0	0	9. Akun
053	Pendampingan Sekolah yang Difasilitasi oleh LPMP					0	0	1.757.070.000	1.620.950.243	0	0	0	0	1.757.070.000	1.620.950.243	92,25	136.119.757	0	7. Komponen
053.AA	Pendampingan TC Gala Siswa Indonesia					0	0	11.206.000	11.201.328	0	0	0	0	11.206.000	11.201.328	99,96	4.672	0	8. Sub
521211	Belanja Bahan					0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	100,00	0	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Biasa					0	0	9.606.000	9.601.328	0	0	0	0	9.606.000	9.601.328	99,95	4.672	0	9. Akun
053.B	Monitoring Evaluasi Sekolah Binaan, Imbas dan TPMPD					0	0	481.980.000	481.719.915	0	0	0	0	481.980.000	481.719.915	99,95	260.085	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	17.640.000	17.625.715	0	0	0	0	17.640.000	17.625.715	99,92	14.285	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Biasa					0	0	464.340.000	464.094.200	0	0	0	0	464.340.000	464.094.200	99,95	245,8	0	9. Akun
053.V	Pendampingan Sekolah yang Difasilitasi oleh LPMP melalui Daring					0	0	973.884.000	931.049.000	0	0	0	0	973.884.000	931.049.000	95,60	42.835.000	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	96.984.000	54.149.000	0	0	0	0	96.984.000	54.149.000	55,83	42.835.000	0	9. Akun
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					0	0	87.000.000	87.000.000	0	0	0	0	87.000.000	87.000.000	100,00	0	0	9. Akun
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	681.900.000	681.900.000	0	0	0	0	681.900.000	681.900.000	100,00	0	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	108.000.000	108.000.000	0	0	0	0	108.000.000	108.000.000	100,00	0	0	9. Akun
053.YY	Modul Pembelajaran					0	0	290.000.000	196.980.000	0	0	0	0	290.000.000	196.980.000	67,92	93.020.000	0	8. Sub
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	290.000.000	196.980.000	0	0	0	0	290.000.000	196.980.000	67,92	93.020.000	0	9. Akun
5630.003.002	Sekolah yang Difasilitasi Melalui Kemitraan					0	0	426.963.000	368.506.475	0	0	0	0	426.963.000	368.506.475	86,31	58.456.525	0	6. Sub Output
052	Bimbingan Teknis SPME					0	0	262.685.000	234.744.845	0	0	0	0	262.685.000	234.744.845	89,36	27.940.155	0	7. Komponen
052.B	Sinkronisasi/ Sosialisasi Program PMP kepada Pemerintah Daerah/ Sekolah					0	0	21.059.000	21.058.820	0	0	0	0	21.059.000	21.058.820	100,00	180	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	13.509.000	13.508.820	0	0	0	0	13.509.000	13.508.820	100,00	180	0	9. Akun

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Belanja Bansos		Total				Blokir	
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran		
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					0	0	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000	100,00	0	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	4.900.000	4.900.000	100,00	0	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	900	900	0	0	0	0	900	900	100,00	0	0	9. Akun
052.V	Penyusunan Program Kerja SPME Pemerintah Daerah melalui Daring					0	0	241.626.000	213.686.025	0	0	0	0	241.626.000	213.686.025	88,44	27.939.975	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	47.456.000	37.531.025	0	0	0	0	47.456.000	37.531.025	79,09	9.924.975	0	9. Akun
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					0	0	8.150.000	7.550.000	0	0	0	0	8.150.000	7.550.000	92,64	600	0	9. Akun
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	21.250.000	17.785.000	0	0	0	0	21.250.000	17.785.000	83,69	3.465.000	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	35.100.000	24.400.000	0	0	0	0	35.100.000	24.400.000	69,52	10.700.000	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	129.670.000	126.420.000	0	0	0	0	129.670.000	126.420.000	97,49	3.250.000	0	9. Akun
053	Diseminasi Hasil					0	0	157.278.000	126.761.630	0	0	0	0	157.278.000	126.761.630	80,60	30.516.370	0	7. Komponen
053.W	Monitoring Kebijakan Kemendikbud					0	0	157.278.000	126.761.630	0	0	0	0	157.278.000	126.761.630	80,60	30.516.370	0	8. Sub
521211	Belanja Bahan					0	0	8.995.000	4.140.630	0	0	0	0	8.995.000	4.140.630	46,03	4.854.370	0	9. Akun
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					0	0	9.750.000	0	0	0	0	0	9.750.000	0	0,00	9.750.000	0	9. Akun
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	1.500.000	700	0	0	0	0	1.500.000	700	46,67	800	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	12.600.000	0	0	0	0	0	12.600.000	0	0,00	12.600.000	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Biasa					0	0	114.533.000	114.521.000	0	0	0	0	114.533.000	114.521.000	99,99	12	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	9.900.000	7.400.000	0	0	0	0	9.900.000	7.400.000	74,75	2.500.000	0	9. Akun
061	Sosialisasi SPMPDM kepada pemerintah daerah					0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000	100,00	0	0	7. Komponen
061.V	Sosialisasi SPMPDM kepada pemerintah daerah melalui Daring					0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000	100,00	0	0	8. Sub Komponen
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	6.100.000	6.100.000	0	0	0	0	6.100.000	6.100.000	100,00	0	0	9. Akun
524119	Belanja Perjalanan Lainnya					0	0	900	900	0	0	0	0	900	900	100,00	0	0	9. Akun
5630.004	Satuan Pendidikan yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya	Sekolah	5.588	5.588	100,00	0	0	816.857.000	806.124.158	0	0	0	0	816.857.000	806.124.158	98,69	10.732.842	0	5. Output
5630.004.001	Sekolah yang telah diverifikasi mutu pendidikannya					0	0	816.857.000	806.124.158	0	0	0	0	816.857.000	806.124.158	98,69	10.732.842	0	6. Sub Output
051	Bimbingan Teknis Pengawas					0	0	26.653.000	26.626.603	0	0	0	0	26.653.000	26.626.603	99,90	26.397	0	7. Komponen
051.B	Layanan Perpustakaan dan ULT Keliling PMP					0	0	26.653.000	26.626.603	0	0	0	0	26.653.000	26.626.603	99,90	26.397	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	6.237.000	6.237.000	0	0	0	0	6.237.000	6.237.000	100,00	0	0	9. Akun
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	5.396.000	5.369.603	0	0	0	0	5.396.000	5.369.603	99,51	26.397	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Biasa					0	0	15.020.000	15.020.000	0	0	0	0	15.020.000	15.020.000	100,00	0	0	9. Akun
052	Bimtek Fasilitator Daerah Pengumpulan Data					0	0	607.646.000	600.683.475	0	0	0	0	607.646.000	600.683.475	98,85	6.962.525	0	7. Komponen
052.C	Benchmarking Pemetaan Mutu Pendidikan					0	0	25.464.000	21.846.600	0	0	0	0	25.464.000	21.846.600	85,79	3.617.400	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	3.617.000	0	0	0	0	0	3.617.000	0	0,00	3.617.000	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Biasa					0	0	21.847.000	21.846.600	0	0	0	0	21.847.000	21.846.600	100,00	400	0	9. Akun
052.V	Bimbingan Teknis Operator Dapodik dan Pengawas Sekolah					0	0	582.182.000	578.836.875	0	0	0	0	582.182.000	578.836.875	99,43	3.345.125	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	209.032.000	206.690.275	0	0	0	0	209.032.000	206.690.275	98,88	2.341.725	0	9. Akun
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					0	0	27.550.000	27.550.000	0	0	0	0	27.550.000	27.550.000	100,00	0	0	9. Akun
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	8.500.000	7.500.000	0	0	0	0	8.500.000	7.500.000	88,24	1.000.000	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	38.550.000	38.550.000	0	0	0	0	38.550.000	38.550.000	100,00	0	0	9. Akun
524119	Belanja Perjalanan Lainnya					0	0	298.550.000	298.546.600	0	0	0	0	298.550.000	298.546.600	100,00	3.4	0	9. Akun

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Belanja Bansos		Total				Blokir	
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran		
053	Pelaksanaan Pengumpulan Data					0	0	46.620.000	42.882.400	0	0	0	0	46.620.000	42.882.400	91,98	3.737.600	0	7. Komponen
053.V	Koordinasi Pelaksanaan Pengumpulan Data					0	0	46.620.000	42.882.400	0	0	0	0	46.620.000	42.882.400	91,98	3.737.600	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	3.720.000	0	0	0	0	0	3.720.000	0	0,00	3.720.000	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Biasa					0	0	42.900.000	42.882.400	0	0	0	0	42.900.000	42.882.400	99,96	17.6	0	9. Akun
054	Verifikasi dan Validasi					0	0	135.938.000	135.931.680	0	0	0	0	135.938.000	135.931.680	100,00	6.32	0	7. Komponen
054.V	Verifikasi dan Validasi					0	0	135.938.000	135.931.680	0	0	0	0	135.938.000	135.931.680	100,00	6.32	0	8. Sub
521211	Belanja Bahan					0	0	5.660.000	5.654.280	0	0	0	0	5.660.000	5.654.280	99,90	5.72	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Biasa					0	0	113.778.000	113.777.400	0	0	0	0	113.778.000	113.777.400	100,00	600	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	16.500.000	16.500.000	0	0	0	0	16.500.000	16.500.000	100,00	0	0	9. Akun
5630.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	100,00	0	0	0	0	729.486.000	684.962.200	0	0	729.486.000	684.962.200	93,90	44.523.800	0	5. Output
5630.951.001	Layanan Internal					0	0	0	0	729.486.000	684.962.200	0	0	729.486.000	684.962.200	93,90	44.523.800	0	6. Sub Output
996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi					0	0	0	0	386.170.000	375.446.500	0	0	386.170.000	375.446.500	97,22	10.723.500	0	7. Komponen
996.A	tanpa sub komponen					0	0	0	0	386.170.000	375.446.500	0	0	386.170.000	375.446.500	97,22	10.723.500	0	8. Sub
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0	0	0	0	386.170.000	375.446.500	0	0	386.170.000	375.446.500	97,22	10.723.500	0	9. Akun
997	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran					0	0	0	0	343.316.000	309.515.700	0	0	343.316.000	309.515.700	90,15	33.800.300	0	7. Komponen
997.A	tanpa sub komponen					0	0	0	0	343.316.000	309.515.700	0	0	343.316.000	309.515.700	90,15	33.800.300	0	8. Sub
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0	0	0	0	343.316.000	309.515.700	0	0	343.316.000	309.515.700	90,15	33.800.300	0	9. Akun
5630.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	100,00	0	0	1.931.518.000	1.872.415.529	0	0	0	0	1.931.518.000	1.872.415.529	96,94	59.102.471	0	5. Output
5630.970.001	Layanan Dukungan Manajemen Satker					0	0	1.931.518.000	1.872.415.529	0	0	0	0	1.931.518.000	1.872.415.529	96,94	59.102.471	0	6. Sub Output
051	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran					0	0	6.528.000	6.528.000	0	0	0	0	6.528.000	6.528.000	100,00	0	0	7. Komponen
051.A	Penyusunan Review Renstra					0	0	6.528.000	6.528.000	0	0	0	0	6.528.000	6.528.000	100,00	0	0	8. Sub
521211	Belanja Bahan					0	0	2.478.000	2.478.000	0	0	0	0	2.478.000	2.478.000	100,00	0	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	4.050.000	4.050.000	0	0	0	0	4.050.000	4.050.000	100,00	0	0	9. Akun
052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi					0	0	159.150.000	159.106.710	0	0	0	0	159.150.000	159.106.710	99,97	43.29	0	7. Komponen
052.B	Monitoring Evaluasi Program PMP dan Program Pusat					0	0	159.150.000	159.106.710	0	0	0	0	159.150.000	159.106.710	99,97	43.29	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	4.646.000	4.645.710	0	0	0	0	4.646.000	4.645.710	99,99	290	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Biasa					0	0	115.304.000	115.261.000	0	0	0	0	115.304.000	115.261.000	99,96	43	0	9. Akun
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota					0	0	29.600.000	29.600.000	0	0	0	0	29.600.000	29.600.000	100,00	0	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	9.600.000	100,00	0	0	9. Akun
053	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan					0	0	275.991.000	275.972.150	0	0	0	0	275.991.000	275.972.150	99,99	18.85	0	7. Komponen
053.A	Reviu SOP					0	0	275.991.000	275.972.150	0	0	0	0	275.991.000	275.972.150	99,99	18.85	0	8. Sub
521211	Belanja Bahan					0	0	24.901.000	24.900.150	0	0	0	0	24.901.000	24.900.150	100,00	850	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	7.400.000	7.400.000	0	0	0	0	7.400.000	7.400.000	100,00	0	0	9. Akun
524119	Belanja Perjalanan Lainnya					0	0	243.690.000	243.672.000	0	0	0	0	243.690.000	243.672.000	99,99	18	0	9. Akun
054	Pengelolaan kepegawaian					0	0	219.637.000	195.372.300	0	0	0	0	219.637.000	195.372.300	88,95	24.264.700	0	7. Komponen
054.B	Pengelolaan Barang Milik Negara					0	0	6.485.000	3.534.850	0	0	0	0	6.485.000	3.534.850	54,51	2.950.150	0	8. Sub
521211	Belanja Bahan					0	0	3.535.000	3.534.850	0	0	0	0	3.535.000	3.534.850	100,00	150	0	9. Akun
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					0	0	2.950.000	0	0	0	0	0	2.950.000	0	0,00	2.950.000	0	9. Akun
054.C	Pengembangan Kapasitas Pegawai LPMP					0	0	150.190.000	145.337.450	0	0	0	0	150.190.000	145.337.450	96,77	4.852.550	0	8. Sub
521211	Belanja Bahan					0	0	38.376.000	38.375.650	0	0	0	0	38.376.000	38.375.650	100,00	350	0	9. Akun
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	23.700.000	23.700.000	0	0	0	0	23.700.000	23.700.000	100,00	0	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	46.000.000	41.150.000	0	0	0	0	46.000.000	41.150.000	89,46	4.850.000	0	9. Akun



Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Belanja Bansos		Total				Blokir	
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran		
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota					0	0	11.850.000	11.850.000	0	0	0	0	11.850.000	11.850.000	100,00	0	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	30.264.000	30.261.800	0	0	0	0	30.264.000	30.261.800	99,99	2.2	0	9. Akun
054.D	Benchmarking Penjaminan Mutu Pendidikan					0	0	62.962.000	46.500.000	0	0	0	0	62.962.000	46.500.000	73,85	16.462.000	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	962	0	0	0	0	0	962	0	0,00	962	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Biasa					0	0	62.000.000	46.500.000	0	0	0	0	62.000.000	46.500.000	75,00	15.500.000	0	9. Akun
055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan					0	0	1.270.212.000	1.235.436.369	0	0	0	0	1.270.212.000	1.235.436.369	97,26	34.775.631	0	7. Komponen
055.A	Pencetakan dan Publikasi Data dan Informasi LPMP					0	0	162.552.000	161.701.010	0	0	0	0	162.552.000	161.701.010	99,48	850.99	0	8. Sub Komponen
521211	Belanja Bahan					0	0	162.552.000	161.701.010	0	0	0	0	162.552.000	161.701.010	99,48	850.99	0	9. Akun
055.B	Pelayanan Data Dan Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan					0	0	34.200.000	34.200.000	0	0	0	0	34.200.000	34.200.000	100,00	0	0	8. Sub Komponen
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					0	0	34.200.000	34.200.000	0	0	0	0	34.200.000	34.200.000	100,00	0	0	9. Akun
055.D	Penyusunan Buletin					0	0	14.180.000	14.180.000	0	0	0	0	14.180.000	14.180.000	100,00	0	0	8. Sub
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					0	0	14.180.000	14.180.000	0	0	0	0	14.180.000	14.180.000	100,00	0	0	9. Akun
055.F	Penilaian Angka Kredit Guru					0	0	37.800.000	37.800.000	0	0	0	0	37.800.000	37.800.000	100,00	0	0	8. Sub
521213	Belanja Honor Output Kegiatan					0	0	37.800.000	37.800.000	0	0	0	0	37.800.000	37.800.000	100,00	0	0	9. Akun
055.G	Pengembangan Soft Skill Pegawai					0	0	620.166.000	618.556.000	0	0	0	0	620.166.000	618.556.000	99,74	1.610.000	0	8. Sub
521211	Belanja Bahan					0	0	83.806.000	83.631.000	0	0	0	0	83.806.000	83.631.000	99,79	175	0	9. Akun
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	55.000.000	54.945.000	0	0	0	0	55.000.000	54.945.000	99,90	55	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000	100,00	0	0	9. Akun
524119	Belanja Perjalanan Lainnya					0	0	477.760.000	476.380.000	0	0	0	0	477.760.000	476.380.000	99,71	1.380.000	0	9. Akun
055.H	Gebyar Perayaan Hari Besar Nasional					0	0	14.400.000	14.400.000	0	0	0	0	14.400.000	14.400.000	100,00	0	0	8. Sub
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	14.400.000	14.400.000	0	0	0	0	14.400.000	14.400.000	100,00	0	0	9. Akun
055.I	Pengembangan Layanan Mutu Pendidikan					0	0	161.240.000	153.440.000	0	0	0	0	161.240.000	153.440.000	95,16	7.800.000	0	8. Sub
521211	Belanja Bahan					0	0	30.900.000	30.490.000	0	0	0	0	30.900.000	30.490.000	98,67	410	0	9. Akun
522151	Belanja Jasa Profesi					0	0	88.200.000	84.600.000	0	0	0	0	88.200.000	84.600.000	95,92	3.600.000	0	9. Akun
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0	0	42.140.000	38.350.000	0	0	0	0	42.140.000	38.350.000	91,01	3.790.000	0	9. Akun
055.XX	Penanggulangan Covid 19					0	0	225.674.000	201.159.359	0	0	0	0	225.674.000	201.159.359	89,14	24.514.641	0	8. Sub
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19					0	0	18.077.000	18.046.600	0	0	0	0	18.077.000	18.046.600	99,83	30.4	0	9. Akun
521211	Belanja Bahan					0	0	2.812.000	2.803.800	0	0	0	0	2.812.000	2.803.800	99,71	8.2	0	9. Akun
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					0	0	56.940.000	56.931.581	0	0	0	0	56.940.000	56.931.581	99,99	8.419	0	9. Akun
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19					0	0	32.425.000	32.417.378	0	0	0	0	32.425.000	32.417.378	99,98	7.622	0	9. Akun
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19					0	0	26.450.000	1.990.000	0	0	0	0	26.450.000	1.990.000	7,52	24.460.000	0	9. Akun
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota					0	0	55.650.000	55.650.000	0	0	0	0	55.650.000	55.650.000	100,00	0	0	9. Akun
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19					0	0	33.320.000	33.320.000	0	0	0	0	33.320.000	33.320.000	100,00	0	0	9. Akun
5630.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100,00	9.417.999.000	9.292.465.198	5.957.253.000	5.671.818.069	0	0	0	0	15.375.252.000	14.964.283.267	97,33	410.968.733	0	5. Output
5630.994.001	Layanan Perkantoran					9.417.999.000	9.292.465.198	5.957.253.000	5.671.818.069	0	0	0	0	15.375.252.000	14.964.283.267	97,33	410.968.733	0	6. Sub Output
001	Gaji dan Tunjangan					9.417.999.000	9.292.465.198	0	0	0	0	0	0	9.417.999.000	9.292.465.198	98,67	125.533.802	0	7. Komponen
001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan					9.417.999.000	9.292.465.198	0	0	0	0	0	0	9.417.999.000	9.292.465.198	98,67	125.533.802	0	8. Sub
511111	Belanja Gaji Pokok PNS					4.027.069.000	3.997.352.520	0	0	0	0	0	0	4.027.069.000	3.997.352.520	99,26	29.716.480	0	9. Akun
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS					77	51.09	0	0	0	0	0	0	77	51.09	66,35	25.91	0	9. Akun
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS					293.003.000	292.222.956	0	0	0	0	0	0	293.003.000	292.222.956	99,73	780.044	0	9. Akun

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Belanja Bansos		Total				Blokir	
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran		
511122	Belanja Tunj. Anak PNS					95.787.000	94.244.706	0	0	0	0	0	0	95.787.000	94.244.706	98,39	1.542.294	0	9. Akun
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS					43.880.000	36.540.000	0	0	0	0	0	0	43.880.000	36.540.000	83,27	7.340.000	0	9. Akun
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					72.100.000	66.535.000	0	0	0	0	0	0	72.100.000	66.535.000	92,28	5.565.000	0	9. Akun
511125	Belanja Tunj. PPh PNS					31.860.000	8.457.653	0	0	0	0	0	0	31.860.000	8.457.653	26,55	23.402.347	0	9. Akun
511126	Belanja Tunj. Beras PNS					220.467.000	202.124.220	0	0	0	0	0	0	220.467.000	202.124.220	91,68	18.342.780	0	9. Akun
511129	Belanja Uang Makan PNS					600.879.000	587.485.000	0	0	0	0	0	0	600.879.000	587.485.000	97,77	13.394.000	0	9. Akun
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS					205.205.000	181.550.000	0	0	0	0	0	0	205.205.000	181.550.000	88,47	23.655.000	0	9. Akun
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)					3.827.672.000	3.825.902.053	0	0	0	0	0	0	3.827.672.000	3.825.902.053	99,95	1.769.947	0	9. Akun
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor					0	0	5.957.253.000	5.671.818.069	0	0	0	0	5.957.253.000	5.671.818.069	95,21	285.434.931	0	7. Komponen
002.A	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR					0	0	781.814.000	737.936.854	0	0	0	0	781.814.000	737.936.854	94,39	43.877.146	0	8. Sub Komponen
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja					0	0	258.600.000	250.320.000	0	0	0	0	258.600.000	250.320.000	96,80	8.280.000	0	9. Akun
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya					0	0	236.048.000	203.058.440	0	0	0	0	236.048.000	203.058.440	86,02	32.989.560	0	9. Akun
524111	Belanja Perjalanan Biasa					0	0	262.416.000	261.908.414	0	0	0	0	262.416.000	261.908.414	99,81	507.586	0	9. Akun
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota					0	0	24.750.000	22.650.000	0	0	0	0	24.750.000	22.650.000	91,52	2.100.000	0	9. Akun
002.B	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN					0	0	2.144.024.000	2.014.310.132	0	0	0	0	2.144.024.000	2.014.310.132	93,95	129.713.868	0	8. Sub Komponen
521111	Belanja Keperluan Perkantoran					0	0	1.777.944.000	1.659.222.992	0	0	0	0	1.777.944.000	1.659.222.992	93,32	118.721.008	0	9. Akun
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					0	0	366.080.000	355.087.140	0	0	0	0	366.080.000	355.087.140	97,00	10.992.860	0	9. Akun
002.C	PEMELIHARAAN KANTOR					0	0	2.167.115.000	2.122.418.414	0	0	0	0	2.167.115.000	2.122.418.414	97,94	44.696.586	0	8. Sub
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					0	0	1.700.784.000	1.690.786.072	0	0	0	0	1.700.784.000	1.690.786.072	99,41	9.997.928	0	9. Akun
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					0	0	99.311.000	90.861.690	0	0	0	0	99.311.000	90.861.690	91,49	8.449.310	0	9. Akun
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					0	0	367.020.000	340.770.652	0	0	0	0	367.020.000	340.770.652	92,85	26.249.348	0	9. Akun
002.D	LANGGANAN DAYA DAN JASA					0	0	864.300.000	797.152.669	0	0	0	0	864.300.000	797.152.669	92,23	67.147.331	0	8. Sub
521111	Belanja Keperluan Perkantoran					0	0	300.000.000	272.692.202	0	0	0	0	300.000.000	272.692.202	90,90	27.307.798	0	9. Akun
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat					0	0	19.200.000	7.081.000	0	0	0	0	19.200.000	7.081.000	36,88	12.119.000	0	9. Akun
522111	Belanja Langganan Listrik					0	0	542.400.000	515.068.812	0	0	0	0	542.400.000	515.068.812	94,96	27.331.188	0	9. Akun
522112	Belanja Langganan Telepon					0	0	2.700.000	2.310.655	0	0	0	0	2.700.000	2.310.655	85,58	389.345	0	9. Akun
	<b>T O T A L</b>					<b>9.417.999.000</b>	<b>9.292.465.198</b>	<b>13.089.400.000</b>	<b>12.417.458.570</b>	<b>729.486.000</b>	<b>684.962.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.236.885.000</b>	<b>22.394.885.968</b>	<b>96,38</b>	<b>841.999.032</b>	<b>0</b>	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI RIAU**

Jl. Gajah Nomor 21 Bambu Kuning, Pekanbaru 28281

Telepon : (0761) 26389, Faks : (0761) 26389 – 26390

Laman : [lmpriau.kemdikbud.go.id](http://lmpriau.kemdikbud.go.id)

Posel : [sekretariat.lmpriau@kemdikbud.go.id](mailto:sekretariat.lmpriau@kemdikbud.go.id)